



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**GERMAS**  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan adalah hasil kerja keras dan peran serta semua pegawai, kerjasama lintas program dan lintas sektor di lingkungan Kementerian Kesehatan, para *stakeholder* serta dukungan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak atas dukungan, peran serta dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi dan manfaat dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan, khususnya di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, maupun bagi para *stakeholders* terkait.

Jakarta, 26 Januari 2019

Direktur Tata Kelola Obat Publik dan  
Perbekalan Kesehatan,



Dra. Sadiyah, Apt, M.Kes  
NIP. 196011141991032001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam mengkomunikasikan pencapaian hal-hal yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan ditandatangani di awal tahun, serta sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, penilaian atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memperoleh nilai AA dengan kategori sangat memuaskan. Adapun rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Hasil Penilaian	Kategori
1	2015	97,93	AA
2	2016	94,50	AA
3	2017	96,48	AA

Analisis atas pelaksanaan kegiatan di tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka memberikan hasil evaluasi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang merupakan revisi pertama atas Renstra Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 seperti dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Sasaran	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah	1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	77%	79,38%	103,09%	80%	81,57%	101,96%	83%	89,30%	107,59%
	2	Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	55%	57,34%	104,25%	60%	63,88%	106,47%	65%	81,32%	125,11%

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2017 berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target
Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	1 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	85%	85.99%	101.16%	90%	92.83%	103.14%	95%
Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota menerapkan sistem Informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	2 Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	20%	20.26%	101.30%	30%	34.49%	114.97%	40%
Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota melakukan Manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	3 Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	65%	81.32%	125.11%	70%	89.69%	128.13%	75%

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang cukup dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, di samping ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran operasional. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus

motivasi dalam meningkatkan kinerja pengelola obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan melaksanakan Pemilihan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian dilakukan terhadap empat aspek, yaitu :

1. Penguasaan Kompetensi : mencakup aspek legal secara individual sebagai tenaga kefarmasian, kepribadian, dan kemampuan teoritis pengelolaan obat;
2. Kinerja dalam pengelolaan obat : mencakup kemampuan berkoordinasi, kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan obat;
3. Pengembangan diri : mencakup presentasi dan visualisasi pengelola obat untuk meningkatkan kemampuan akademik dan menciptakan karya-karya di bidang kesehatan; dan
4. Penilaian institusi Instalasi Farmasi : mencakup struktur organisasi, SDM, sarana dan prasarana, anggaran dan biaya operasional, dan dukungan pengelolaan obat.

Dari sembilan Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan, diperoleh lima Kabupaten/Kota yang menjadi nominasi dan setelah dilakukan penilaian lapangan ditetapkan tiga pengelola obat di Instalasi farmasi Kabupaten Kota sebagai pemenang yaitu:

1. Desi Tirtawati, S.Farm., Apt : Kepala UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan nilai akhir 89,83;
2. Amelia P. Datunsolang, S.Si., Apt : Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dengan nilai akhir 88,83; dan
3. Ratna Sumirat, M.Farm., Apt : Kepala UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan nilai akhir 86,46.



Gambar 1. Dokumentasi Pemenang Pemilihan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Dalam hal pengelolaan anggaran, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan semula didukung oleh anggaran DIPA tahun 2018 sebesar Rp. 4.650.555.120.000,-. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terjadi revisi DIPA akibat tambahan anggaran berupa hibah luar negeri (HLN) dari *Global Alliance for Vaccine Immunization* (GAVI) sebesar Rp.146.617.155.000,- dan *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp. 152.800.000,- sehingga nilai anggaran DIPA tahun 2018 bertambah menjadi Rp. 4.797.325.075.000,-. Nilai anggaran yang terealisasi di tahun 2018 sebesar Rp. 3.939.003.833.931,- dengan persentase sebesar 82,11%.

Hasil monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART / e-Monev DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan masuk dalam kategori Sangat Baik yaitu sebesar 100%, begitupun dengan nilai IKPA Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yaitu sebesar 95,02%.

Namun dalam usaha untuk meraih prestasi tersebut bukan berarti bebas dari permasalahan. Tantangan yang harus dihadapi di sepanjang tahun 2018 antara lain: 1) Permasalahan dalam penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; 2) Permasalahan dalam pemanfaatan aplikasi logistik obat dan BMHP berbasis elektronik; serta 3) Permasalahan dalam pelaporan data indikator kinerja kegiatan.

Adapun strategi yang diterapkan oleh Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan perbekalan Kesehatan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

- 1) Membentuk Tim Penanggung Jawab pengumpulan data indikator kinerja kegiatan di tingkat Pusat dimana satu orang bertanggung jawab atas satu Provinsi. Hal ini menyebabkan ketaatan akan pelaporan data menjadi lebih optimal sehingga pencapaian terhadap target menjadi maksimal.
- 2) Adanya pemantauan secara berkala terhadap realisasi indikator kinerja kegiatan di tiap triwulan, memberikan *early warning* jika ditemukan permasalahan yang berdampak pada pencapaian target sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan.
- 3) Koordinasi internal dan eksternal yang optimal dengan stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan, terutama untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sehingga semua paket penyediaan obat yang direncanakan dapat direalisasikan.
- 4) Memberikan umpan balik terhadap hasil pelaporan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka menginformasikan ketaatan pelaporan dan manfaat hasil laporan bagi Pusat dan Daerah.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	1
Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	7
Daftar Tabel .....	8
Daftar Gambar .....	10
Daftar Lampiran .....	12
BAB I : Pendahuluan .....	13
A. Latar Belakang .....	13
B. Maksud dan Tujuan .....	13
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	14
D. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II : Perencanaan Kinerja .....	17
A. Perencanaan Kinerja .....	17
B. Perjanjian Kinerja .....	17
BAB III : Akuntabilitas Kinerja .....	21
A. Capaian Kinerja .....	21
B. Realisasi Anggaran .....	46
BAB IV : Penutup .....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2017 berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 .....	4
Tabel 2.	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017.....	4
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 .....	18
Tabel 4.	Program/Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebelum dan sesudah Revisi Renstra Tahun 2015-2019 .....	19
Tabel 5.	Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebelum dan sesudah Revisi Renstra Tahun 2015-2019 .....	20
Tabel 6.	Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Jabatan .....	21
Tabel 7.	Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Golongan .....	22
Tabel 8.	Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Pendidikan .....	23
Tabel 9.	Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Jenis Kelamin .....	23
Tabel 10.	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2018 dan Indikator Kinerja Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2017-2018 .....	26
Tabel 11.	Daftar 20 Item Obat dan Vaksin Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial .....	32
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017-2018 .....	34

Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2018.....	37
Tabel 14.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 .....	46
Tabel 15.	Hasil Penilaian IKPA Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Dokumentasi Pemenang Pemilihan Tenaga Kefarmasian Berprestasi dalam Pengelolaan Obat Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018 .....	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 .....	16
Gambar 3.	Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Jabatan .....	22
Gambar 4.	Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Golongan .....	22
Gambar 5.	Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Pendidikan .....	23
Gambar 6.	Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Jenis Kelamin .....	24
Gambar 7.	Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2018 .....	26
Gambar 8.	Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial Tahun 2017-2019 .....	27
Gambar 9.	Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di 34 Provinsi Tahun 2018 .....	28
Gambar 10.	Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di 34 Provinsi Tahun 2017 .....	29
Gambar 11.	Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2018 .....	30
Gambar 12.	Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015-2017 .....	31
Gambar 13.	Dokumentasi Pertemuan Koordinasi Penyusunan perencanaan Kebutuhan Obat Nasional Tahun 2018 .....	33
Gambar 14.	Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017-2019 .....	35
Gambar 15.	Grafik Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017-2018 .....	35
Gambar 16.	Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penerapan Aplikasi e-Logistik Obat dan BMHP Tahun 2018 .....	37
Gambar 17.	Grafik Capaian Indikator Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2019 .....	38

Gambar 18.	Grafik Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2018 .....	38
Gambar 19.	Grafik Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018 .....	40
Gambar 20.	Grafik Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2017 .....	41
Gambar 21.	Grafik Skor Rata-Rata IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018 .....	42
Gambar 22.	Grafik Skor Rata-Rata IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2017 .....	43
Gambar 23.	Dokumentasi Hasil Bimbingan Teknis Implementasi <i>One Gate Policy</i> Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 .....	44
Gambar 24.	Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pasca Bencana Gempa di Provinsi NTB Tahun 2018 .....	45
Gambar 25.	Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan perbekalan Kesehatan melalui Aplikasi SMART Tahun 2018 .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 .....	51
Lampiran 2.	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 .....	53
Lampiran 3.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2018 .....	54
Lampiran 4	Capaian Indikator Kinerja Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018.....	56
Lampiran 5.	Capaian Indikator Kinerja Persentase IF Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2018 .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam penyelenggaraan SAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 (Revisi Pertama), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2018.

Laporan kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai alat kendali dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kegiatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan pada program kefarmasian dan alat kesehatan merupakan penggambaran visi Presiden Republik Indonesia yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*". Kegiatan tersebut juga mendukung misi Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Tujuan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dapat dilihat pada gambar 1.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018, beserta penjelasan umum mengenai struktur organisasi pada sub bab tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan.

##### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 2018.

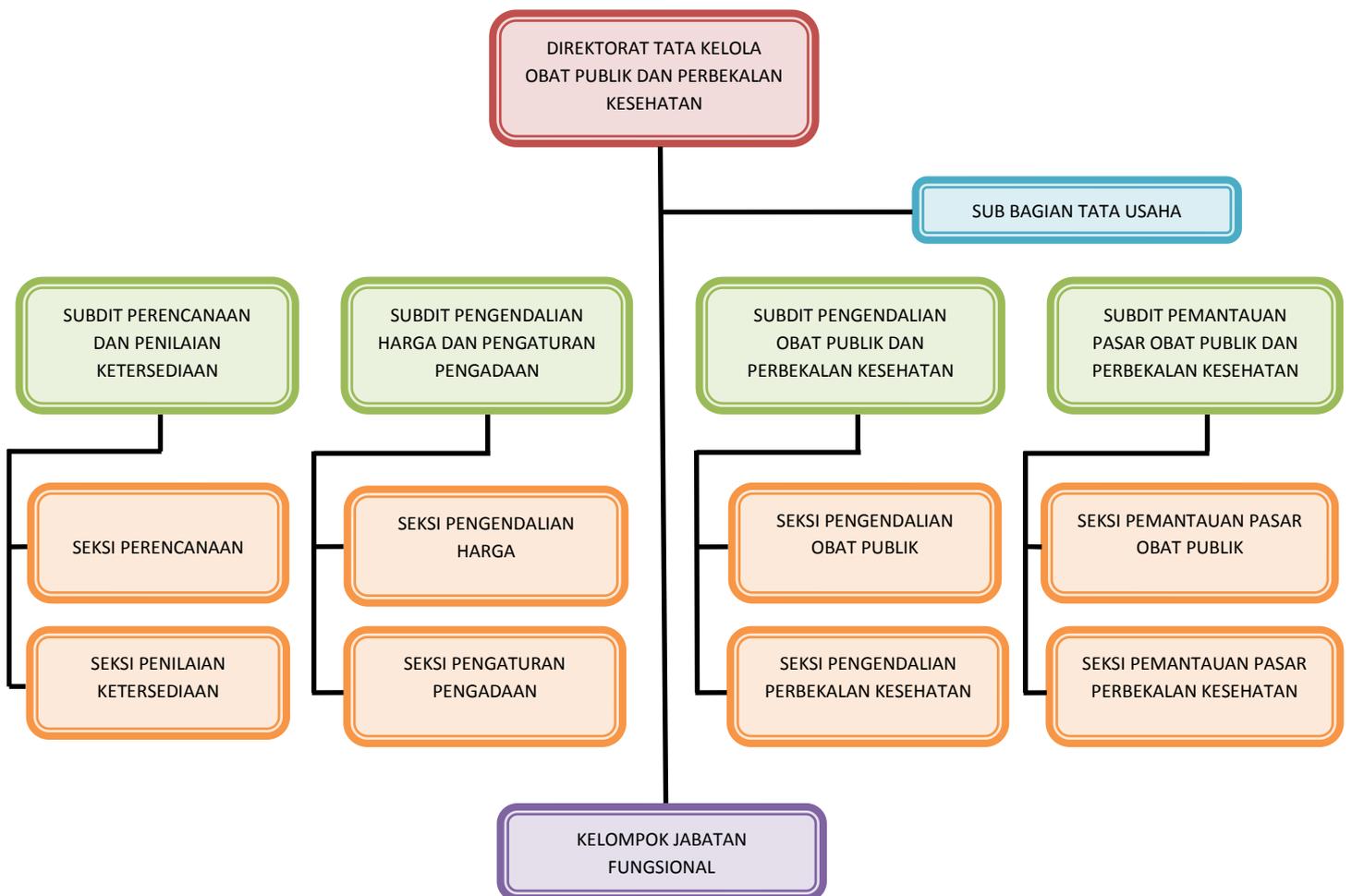
##### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan uraian capaian kinerja organisasi beserta analisisnya dibandingkan dengan pencapaian periode tahun sebelumnya, serta realisasi anggaran

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun.

#### Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, serta pemanfaatan laporan kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis, terarah dan terpadu. Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, namun sejalan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan Pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, dilakukan revisi pertama terhadap Renstra dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017.

Revisi terhadap Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 berdampak pada perubahan program/kegiatan, sasaran dan indikator kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 4 dan 5.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran di awal tahun. RKT Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 dapat dilihat di halaman lampiran.

#### **B. PERJANJIAN KINERJA**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyusun perjanjian kinerja mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 (Revisi Pertama). Target ini menjadi komitmen bagi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk mencapainya dalam kurun waktu sepanjang tahun 2018.

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	1 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	90%
Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota menerapkan sistem Informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	2 Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	30%
Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota melakukan Manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	3 Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	70%

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018

Program/Kegiatan		Sasaran		Indikator Kinerja		Target Kinerja									
Renstra Awal	Renstra Revisi	Renstra Awal	Renstra Revisi	Renstra Awal	Renstra Revisi	Renstra Awal					Renstra Revisi				
						Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau di Pelayanan Kesehatan Pemerintah	Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	77%	80%	83%	86%	90%	-	-	85%	90%	95%
			Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	-	Persentase instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	-	-	-	-	-	-	15%	20%	30%	40%
			Instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Persentase Instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	55%	60%	65%	70%	75%	55%	60%	65%	70%	75%

Tabel 4. Program/Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebelum dan sesudah Revisi Renstra Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan		Uraian	
	Renstra Awal	Renstra Revisi	Renstra Awal	Renstra Revisi
1.	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	<p><b>Definisi Operasional :</b> Tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator.</p> <p><b>Perhitungan :</b> Menghitung persentase ketersediaan obat/vaksin Puskesmas dengan menggunakan rumus berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas}}{\text{Jumlah (n) Puskesmas yang melapor} \times \text{Jumlah total item obat indikator}} \times 100\%$	<p><b>Definisi Operasional :</b> Persentase Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator)</p> <p><b>Perhitungan :</b> Menghitung persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial menggunakan rumus berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang memiliki obat dan vaksin esensial}}{\text{Jumlah Puskesmas di Indonesia yang melapor}} \times 100\%$
2.		Persentase instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)		<p><b>Definisi Operasional :</b> Persentase Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/ kota yang menerapkan sistem elektronik logistik obat dan BMHP.</p> <p><b>Perhitungan :</b> Menghitung persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan menggunakan rumus berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah IF provinsi, kab, kota yg menerapkan sistem elektronik logistik obat dan BMHP}}{\text{Jumlah IF provinsi, kab, kota di Indonesia}} \times 100\%$
3.	Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	<p><b>Definisi Operasional :</b> Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin atau manajemen pengelolaan obat sesuai standar dengan skor minimal 70.</p> <p><b>Perhitungan :</b> Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin atau manajemen pengelolaan obat sesuai standar dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah IF Kab Kota yg melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar}}{\text{Jumlah IF Kab/Kota Seluruh Indonesia}} \times 100\%$	<p><b>Definisi Operasional :</b> Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) yang melakukan pengelolaan obat sesuai standar bila hasil evaluasi menghasilkan skor minimal 70.</p> <p><b>Perhitungan :</b> Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah IF Kab Kota yg melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar}}{\text{Jumlah IF Kab/Kota Seluruh Indonesia}} \times 100\%$

Tabel 5. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebelum dan sesudah Revisi Renstra Tahun 2015-2019

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator beserta permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai sumber data dalam perencanaan di masa mendatang.

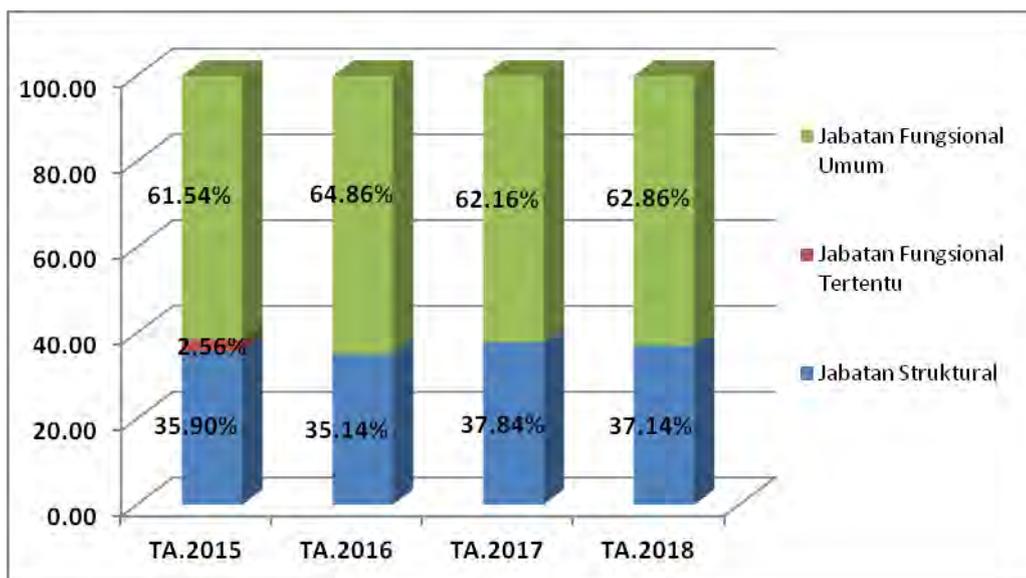
Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang mengacu kepada Revisi Pertama Renstra. Akan tetapi pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra sebelum revisi karena termasuk indikator yang menjadi sasaran RKP.

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, diperlukan dukungan dari berbagai sumber daya. Sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian target organisasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada tahun 2018 berjumlah 35 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 37 orang. Hal ini dikarenakan adanya satu orang ASN yang mengambil pensiun dini dan satu orang ASN cuti di luar tanggungan negara.

Adapun komposisi ASN di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

ASN Menurut Jabatan	Jumlah			
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Jabatan Struktural	14	13	14	13
Jabatan Fungsional Tertentu	1	0	0	0
Jabatan Fungsional Umum	24	24	23	22
<b>Total :</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>35</b>

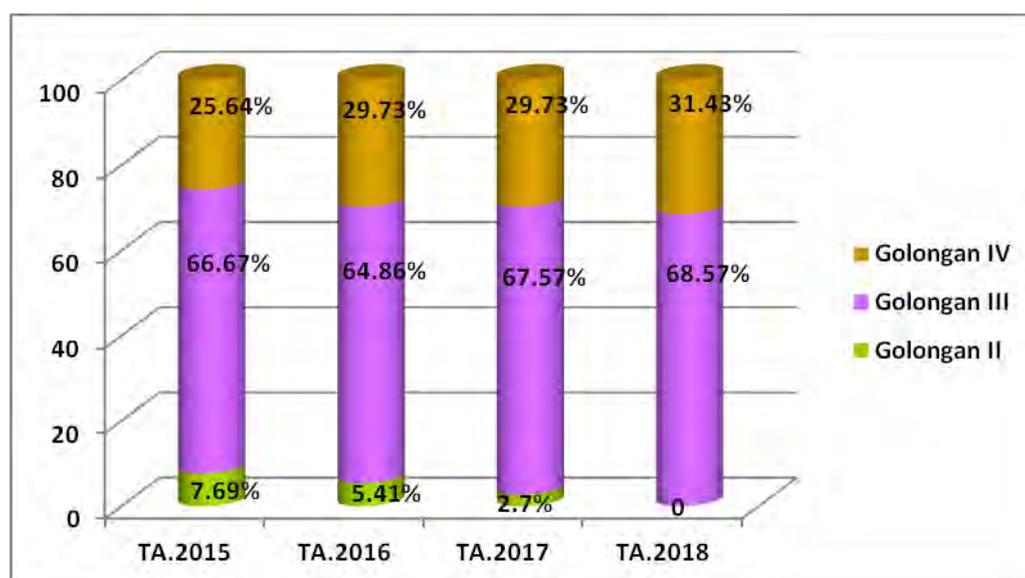
Tabel 6. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Jabatan



Gambar 3. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Jabatan

ASN Menurut Golongan	Jumlah			
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Golongan II	3	2	1	0
Golongan III	26	24	25	24
Golongan IV	10	11	11	11
<b>Total :</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>35</b>

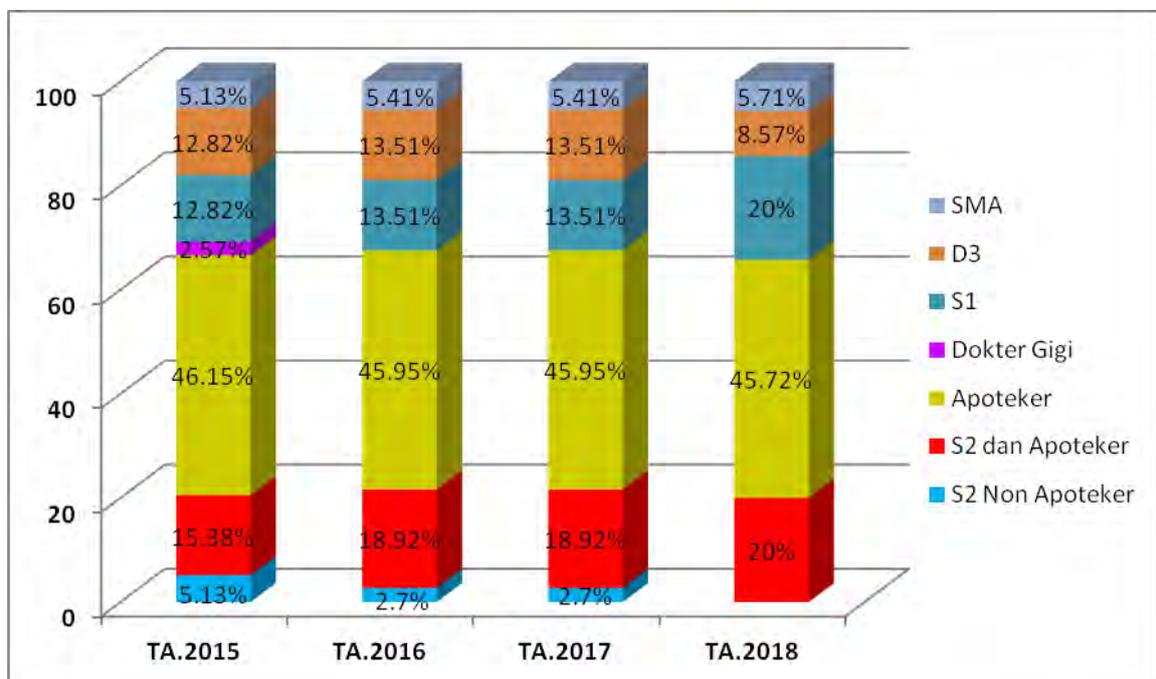
Tabel 7. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Golongan



Gambar 4. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Golongan

ASN Menurut Pendidikan	Jumlah			
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
S2 Non Apoteker	2	1	1	0
S2 dan Apoteker	6	7	7	7
Apoteker	18	17	17	16
Dokter Gigi	1	0	0	0
S1	5	5	5	7
D3	5	5	5	3
SMA	2	2	2	2
<b>Total :</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>35</b>

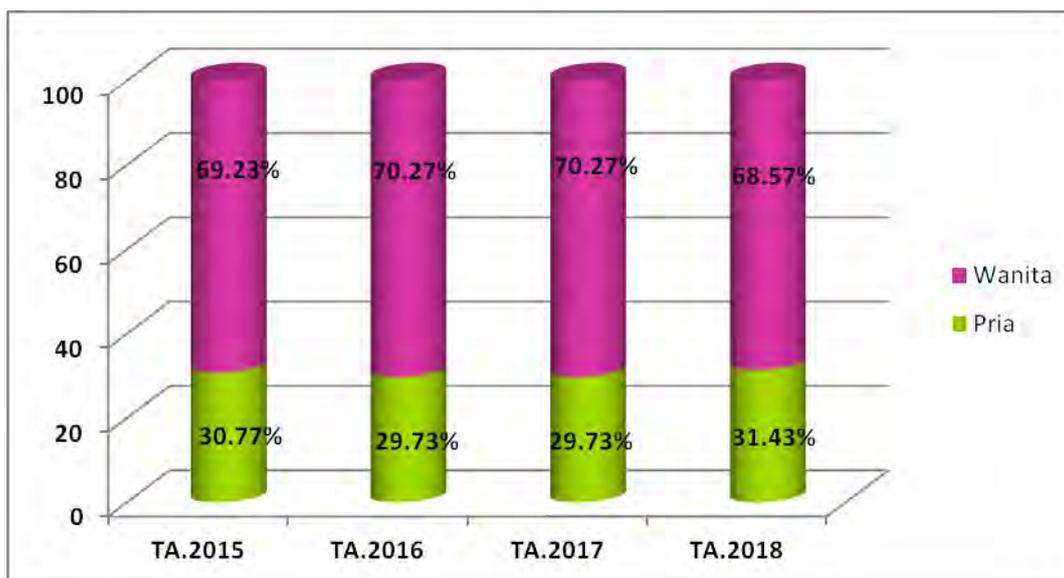
Tabel 8. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Pendidikan



Gambar 5. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Pendidikan

ASN Menurut Jenis Kelamin	Jumlah			
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Pria	12	11	11	11
Wanita	27	26	26	24
<b>Total :</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>35</b>

Tabel 9. Jumlah ASN di Lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Jenis Kelamin



Gambar 6. Grafik Persentase ASN Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018 Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dari tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, jumlah ideal ASN yang dibutuhkan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu 69 orang, 82 orang 92 orang dan 108 orang. Berbanding terbalik dengan jumlah ASN yang selalu berkurang setiap tahun dimana di tahun 2015 sebanyak 39 orang, tahun 2016 dan 2017 sebanyak 37 orang dan di tahun 2018 sebanyak 35 orang. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih sangat diperlukan peningkatan jumlah ASN di lingkungan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Secara teknis sumber daya manusia dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, jenis dan kualitas, serta profesional di bidangnya. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi, kreativitas dan kredibilitas tinggi, serta mampu beradaptasi dan berinovasi dengan perkembangan teknologi dan situasi, maka pencapaian kinerja tentunya akan semakin baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan antara lain melalui penugasan pegawai untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Pembekalan kepada Staf Teknis tentang Aplikasi e-Logistik serta e-Monev Obat dan BMHP;
2. Pelatihan "*Public Speaking & Effective Communication Skill*";
3. Pelatihan Analisa Laporan Keuangan;

4. Penugasan untuk mengikuti Pekan Ilmiah Tahunan 2018 dengan tema “ *Trusted Pharmacist For Better Quality of Life*” dan Kongres XX Ikatan Apoteker Indonesia;
5. Tugas Belajar Program Pendidikan S-2 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Kebijakan dan Hukum Kesehatan serta Biostatistika;
6. Pelatihan Terintegrasi PPIH;
7. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
8. Sertifikasi Bendahara.

Ada tiga Indikator kinerja kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan yang tercantum di dalam revisi pertama Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan perjanjian kinerja tahun 2018. Capaian ketiga indikator kinerja tersebut seluruhnya berhasil melampaui target yang ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja dari indikator kinerja kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

## **1. Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial.**

### **a. Kondisi yang dicapai.**

Realisasi indikator kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di tahun 2018 sebesar 92,83%, melampaui target yang telah ditetapkan di dalam revisi pertama Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan perjanjian kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 90% dengan capaian sebesar 103,14%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan sebesar 1,98%.

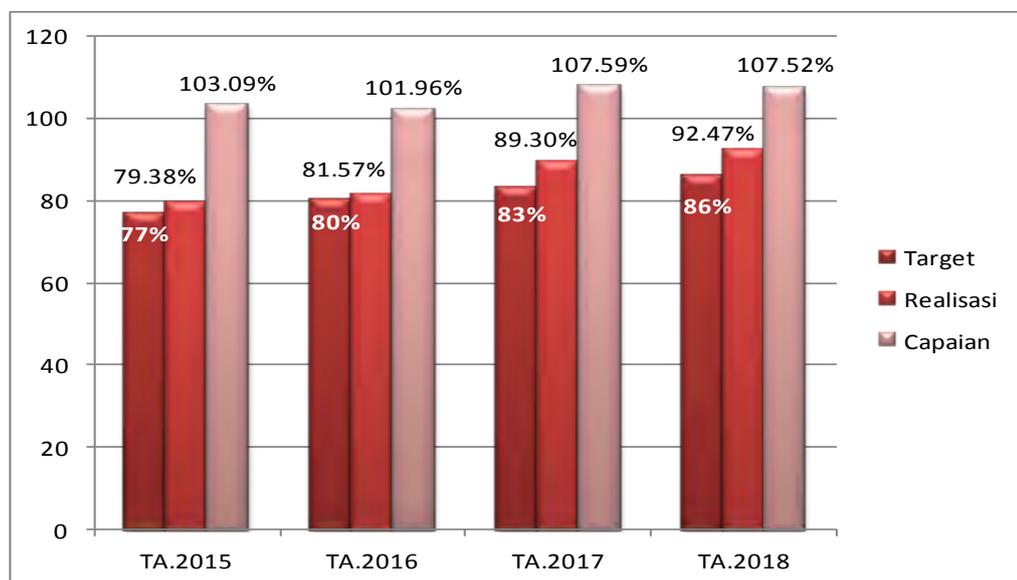
Sementara itu realisasi indikator kinerja Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas tahun 2018 sebesar 92,47%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 sebelum revisi yaitu sebesar 86% dengan capaian sebesar 107,52%. Pengukuran kinerja terhadap indikator ini masih dilakukan karena termasuk dalam salah satu sasaran pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi indikator kinerja ini di tahun 2018 meningkat sebesar 3,17%.

Hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial diperoleh dari periode pelaporan bulan November Tahun 2018 dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak

9.227 Puskesmas dari 9.884 Puskesmas di Indonesia (93,35%), dengan jumlah Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial sebanyak 8.565 Puskesmas. Hasil tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 8.472 Puskesmas dari 9.816 Puskesmas di Indonesia (86,31%), dengan jumlah Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial sebanyak 7.285 Puskesmas.

Indikator Kinerja Kegiatan	TA. 2015			TA. 2016			TA. 2017			TA. 2018		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	-	-	-	-	-	-	85	85,99	101,16	90	92,83	103,14
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	77	79,38	103,09	80	81,57	101,96	83	89,30	107,59	86	92,47	107,52

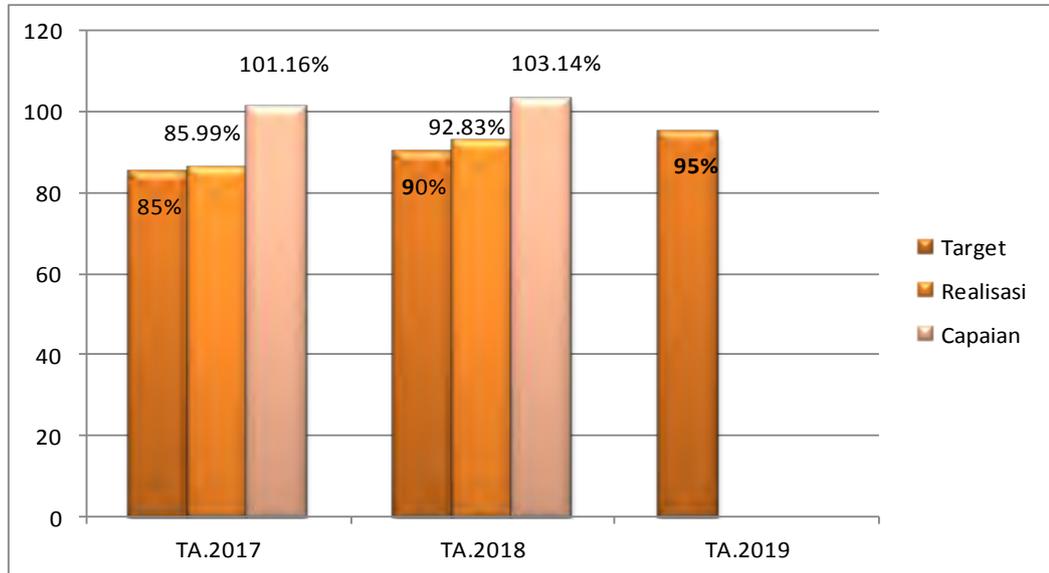
Tabel 10. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2018 dan Indikator Kinerja Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2017-2018



Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Tahun 2015-2018

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan guna menjaga

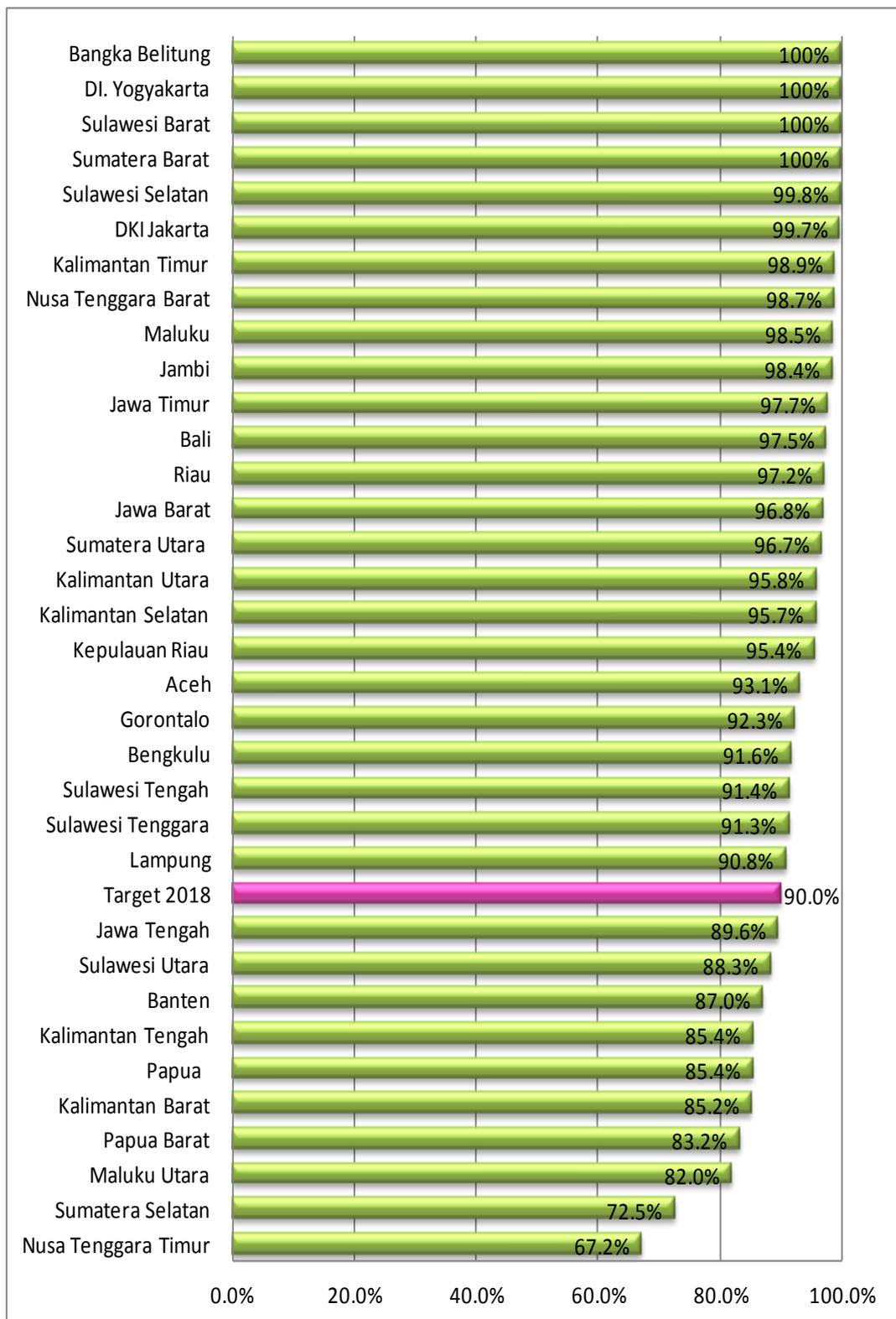
ketersediaan obat dan vaksin esensial di pelayanan kesehatan dasar telah dilaksanakan dengan baik. Terjaminnya ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan kesehatan.



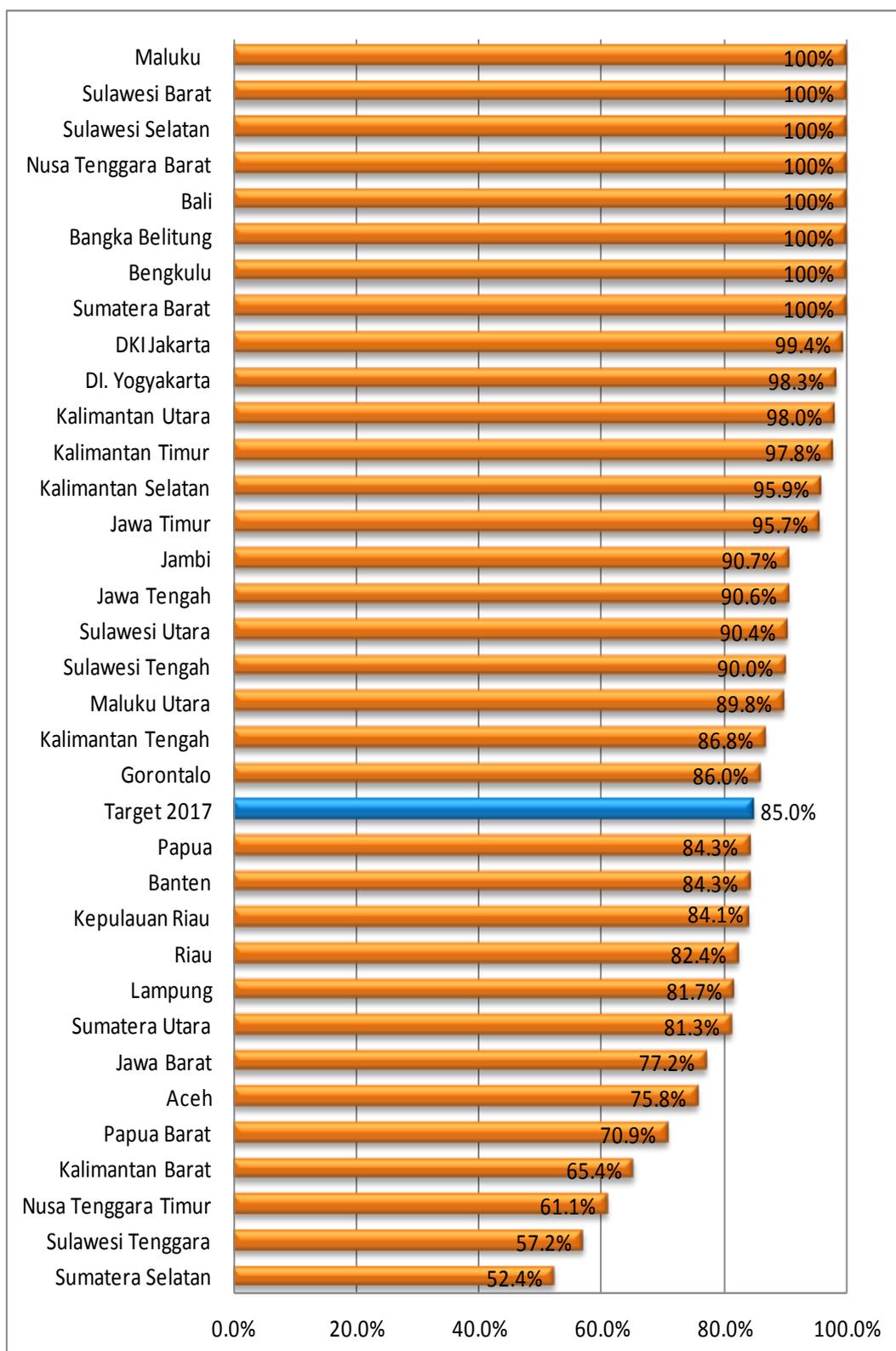
Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2017-2019

Tahun 2018, persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial tertinggi mencapai 100% dimiliki oleh empat Provinsi, yaitu DI. Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat, dimana seluruh Puskesmas yang melapor memiliki 80% obat dan vaksin esensial. Sementara Provinsi dengan persentase terendah adalah Nusa Tenggara Timur (67,20%), dimana dari 378 Puskesmas yang melapor, hanya 254 Puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial.

Peningkatan target indikator persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial dari 85% di tahun 2017 menjadi 90% di tahun 2018 selaras dengan peningkatan jumlah Provinsi yang mampu melebihi target tersebut. Tahun 2017 terdapat 21 Provinsi yang melebihi target, sementara di tahun 2018 terdapat 24 Provinsi yang melebihi target. Selain itu, nilai persentase terendah juga mengalami peningkatan di tahun 2018 (67,20%) bila dibandingkan dengan tahun 2017 (52,40%).

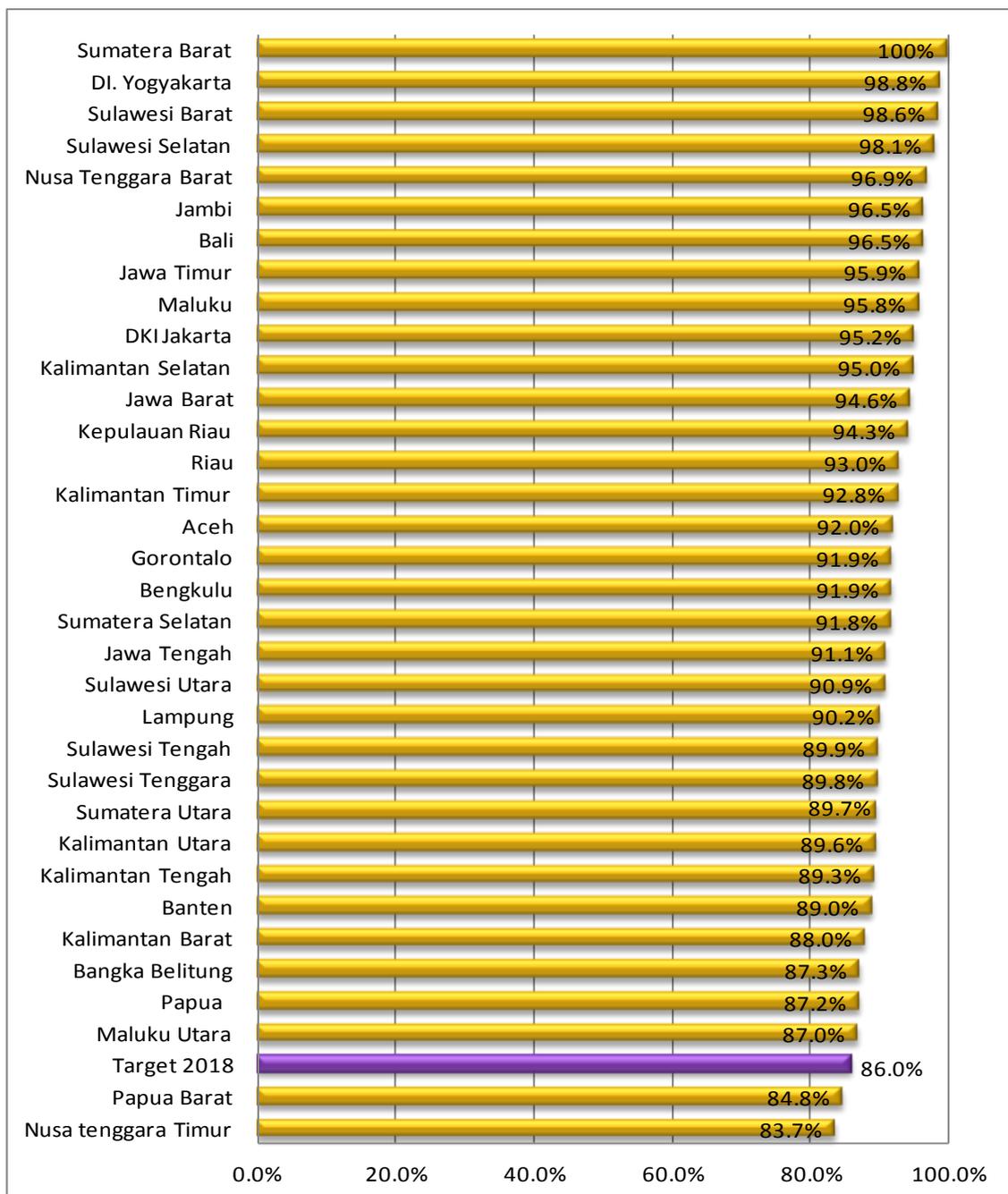


Gambar 9. Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di 34 Provinsi Tahun 2018

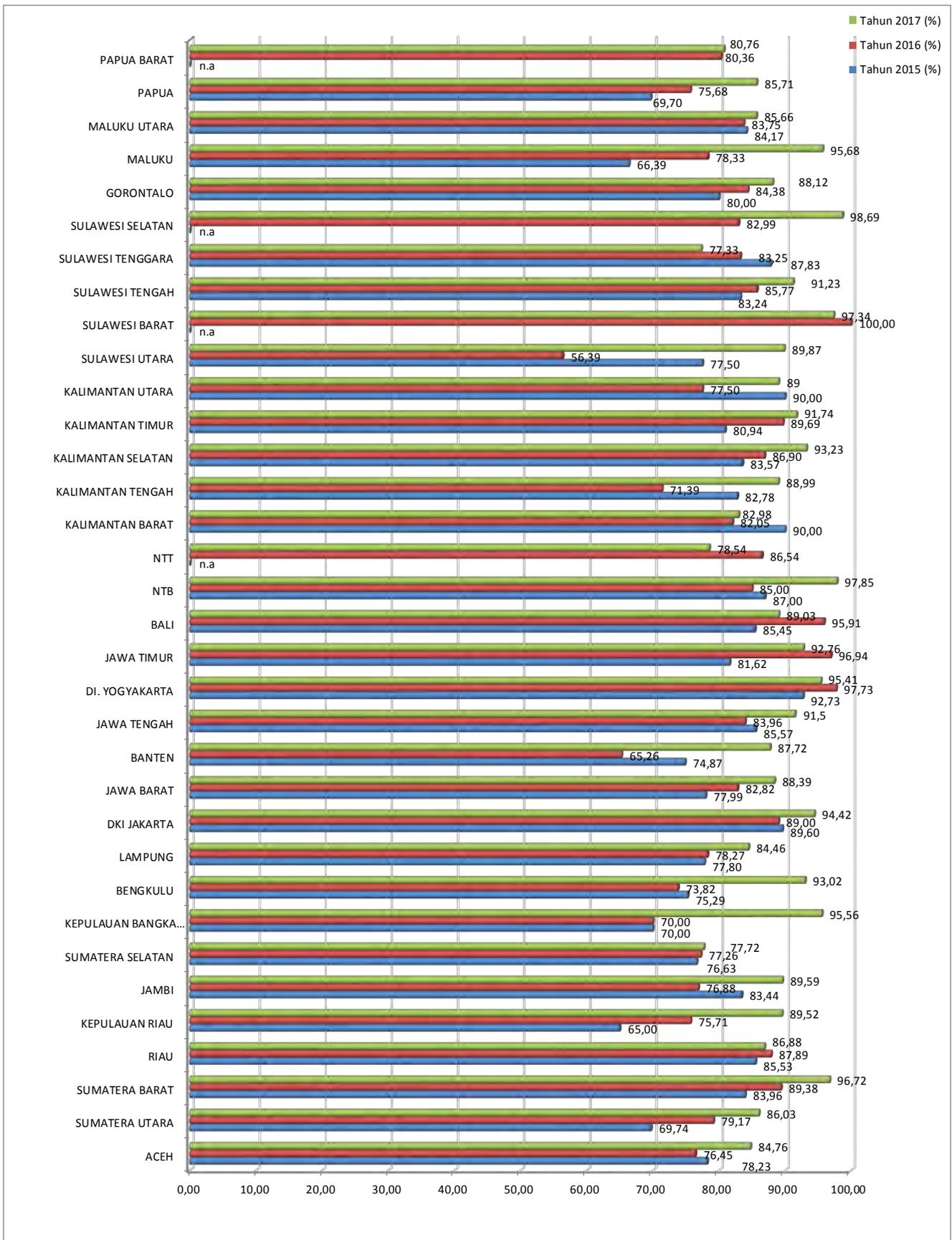


Gambar 10. Grafik Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di 34 Provinsi Tahun 2017

Provinsi dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tertinggi pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 adalah DI. Yogyakarta (92,73%), Sulawesi Barat (100%), Sulawesi Selatan (98,69%) dan Sumatera Barat (100%). Sedangkan Provinsi dengan ketersediaan terendah adalah Kepulauan Riau (65%), Sulawesi Utara (56,39%), Sulawesi Tenggara (77,33%) dan Nusa Tenggara Timur (83,65%). Empat Provinsi yang tidak mengirimkan laporan di tahun 2015 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.



Gambar 11. Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2018



Gambar 12. Grafik Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 34 Provinsi Tahun 2015-2017

Ada dua puluh item obat terpilih yang dijadikan sebagai obat indikator persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial. Item obat tersebut merupakan obat pendukung program kesehatan ibu dan anak, penanggulangan pencegahan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional. Dua puluh item obat indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Obat	Bentuk Sediaan
	Sesudah Revisi	
1	Albendazol	Tablet
2	Amoxicillin 500 mg	Tablet
3	Amoxicillin	Syrup
4	Deksametason 0,5 mg	Tablet
5	Diazepam 5 mg/mL	Injeksi
6	Epinefrin (Adrenalin) 0,1% (sebagai HCL)	Injeksi
7	Fitomenadion (Vitamin K)	Injeksi
8	Furosemid 40 mg / Hidroklorotiazid	Tablet
9	Garam oralit	Serbuk
10	Glibenklamid / Metformin	Tablet
11	Kaptopril	Tablet
12	m Sulfat 20 %	Injeksi
13	Metilergometrin Maleat 0,200 mg-1 ml	Injeksi
14	Obat Anti Tuberculosis dewasa	Tablet
15	Oksitosin	Injeksi
16	Parasetamol 500 mg	Tablet
17	Tablet Tambah Darah	Tablet
18	Vaksin BCG	Injeksi
19	Vaksin Td	Injeksi
20	Vaksin DPT-HB-Hib	Injeksi

Tabel 11. Daftar 20 Item Obat dan Vaksin Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial

#### b. Permasalahan.

Permasalahan dalam pencapaian indikator persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di tahun 2018 adalah adanya penyedia yang tidak dapat memenuhi komitmen terhadap penyediaan obat yang dibeli melalui katalog elektronik.

#### c. Upaya Pemecahan Masalah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Memberikan informasi kepada satker/faskes untuk melakukan pengadaan dengan cara lain sesuai Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Penetapan kriteria pemenang penyedia obat di katalog elektronik perlu diperketat dan mempertimbangkan *track record* pemenuhan komitmennya;
3. Perlu dilakukan kajian terkait penetapan pemenang lelang menggunakan metode *multi winner* untuk item obat selain produk biologis, injeksi sitostatika dan larutan nutrisi elektrolit, dalam pemenuhan ketersediaan obat.

**d. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja.**

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat;
- 2) Monitoring dan Evaluasi Obat, Vaksin dan BMHP;
- 3) Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 4) Menganalisa Data Realisasi Pengadaan Obat Program;
- 5) Mendistribusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan;
- 6) Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Penyakit Tropis Terabaikan, Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS, Program Pengendalian Malaria) dan Vaksin;
- 7) Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat;
- 8) Menyusun Profil Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan.



Gambar 13. Dokumentasi Pertemuan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Nasional Tahun 2018

## 2. Indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

### a. Kondisi yang dicapai.

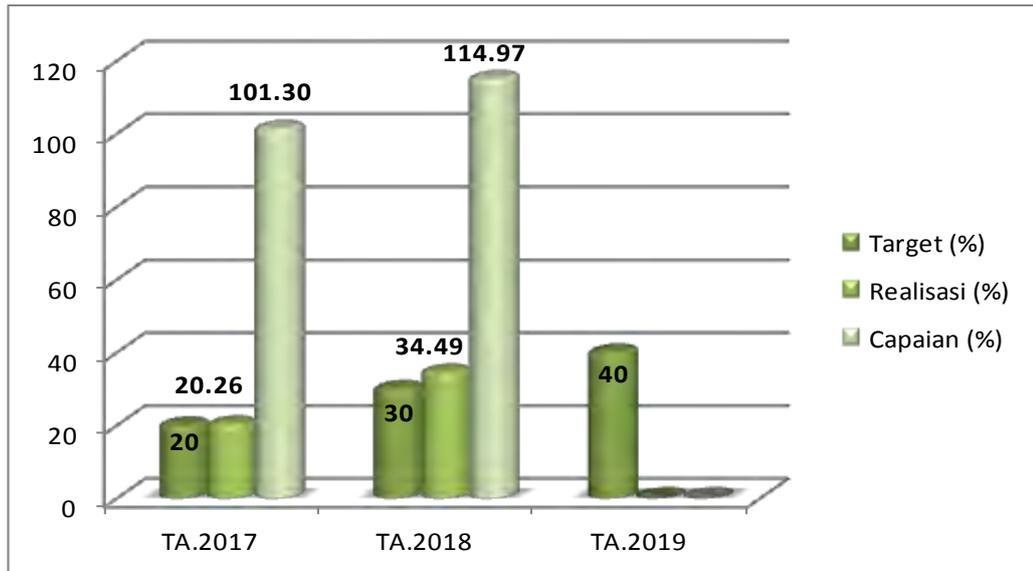
Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaknai sebagai Instalasi Farmasi yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) jika memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota/Provinsi menggunakan sistem informasi obat dan BMHP elektronik (aplikasi e-logistik) mulai dari proses penerimaan, LPLPO, distribusi, dan integrasi ke bank data pusat.
- 2) Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota/Provinsi menggunakan sistem informasi obat dan BMHP elektronik sendiri berbasis *database* yang di dalamnya terdapat fungsi manajemen logistik obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan.

Realisasi indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP di tahun 2018 sebesar 34,49%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Revisi Pertama Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 30% dengan capaian sebesar 114,97%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat peningkatan capaian sebesar 13,67%. Pencapaian tersebut menunjukkan hal yang positif dan diharapkan dapat mencapai target indikator di akhir tahun Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 40%.

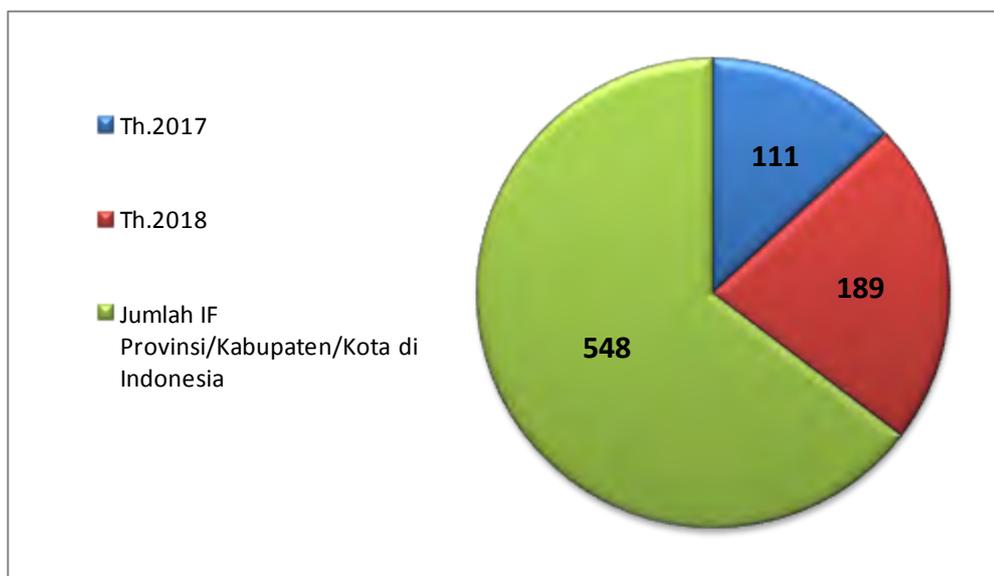
Indikator Kinerja Kegiatan	TA. 2017			TA. 2018		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP	20	20.26	101.30	30	34.49	114.97

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017-2018



Gambar 14. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017-2019

Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP di tahun 2018 sebanyak 189, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 111 dari 548 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.



Gambar 15. Grafik Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun 2017- 2018

Tercapainya target indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP dalam kurun waktu dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam mendorong penggunaan sistem informasi manajemen logistik obat dan BMHP secara elektronik.

Penerapan sistem informasi manajemen logistik obat dan BMHP secara elektronik memungkinkan perolehan data dan informasi terkait ketersediaan obat dan BMHP di setiap tingkat pelayanan kesehatan secara otomatis. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam menjaga ketersediaan obat dan BMHP baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang optimal dari pelayanan kesehatan.

**b. Permasalahan.**

Permasalahan dalam pencapaian indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP di tahun 2018 adalah rendahnya kepatuhan terhadap penggunaan aplikasi logistik obat dan BMHP di Daerah.

**c. Upaya Pemecahan Masalah.**

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain :

- 1) Memanfaatkan hasil evaluasi penggunaan dana DAK Non Fisik untuk pemanfaatan aplikasi logistik obat dan BMHP sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian dana DAK di tahun berikutnya;
- 2) Melakukan pengembangan terhadap aplikasi e-Logistik dengan mengakomodir kebutuhan pengguna di Daerah.

**d. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator.**

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pemantapan Aplikasi e-Logistik serta e-Monev Katalog Obat dan BMHP.
- 2) Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi e-Logistik dan e-Monev Obat dan BMHP di 24 Provinsi.



Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Penerapan Aplikasi e-Logistik dan Obat dan BMHP Tahun 2018

### 3. Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar.

#### a. Kondisi yang dicapai.

Realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di tahun 2018 sebesar 89,69%, melebihi target yang telah ditetapkan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 70% dengan capaian sebesar 128,13%. Capaian indikator kinerja ini selalu mengalami peningkatan semenjak tahun 2015 dan bila dibandingkan dengan tahun 2017, capaiannya meningkat sebesar 3,02%.

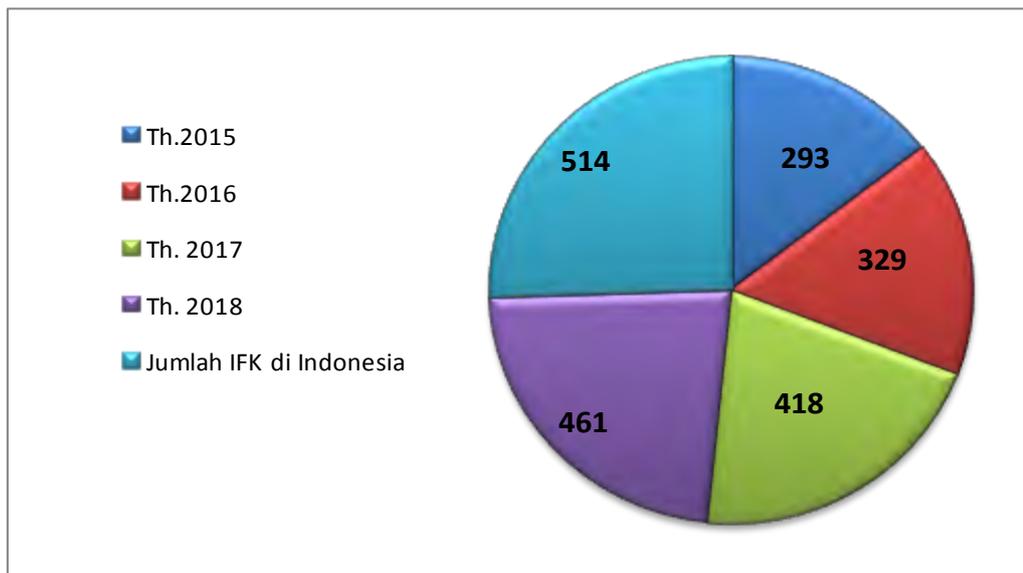
Indikator Kinerja Kegiatan	TA. 2015			TA. 2016			TA. 2017			TA. 2018		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	55	57.34	104.25	60	63.88	106.47	65	81.32	125.11	70	89.69	128.13

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2018



Gambar 17. Grafik Capaian Indikator Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2019

Tahun 2018, jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar sebanyak 461 dari 514 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017, 2016 dan 2015 dimana jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar adalah 418, 329 dan 239 IFK.



Gambar 18. Grafik Jumlah IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2018

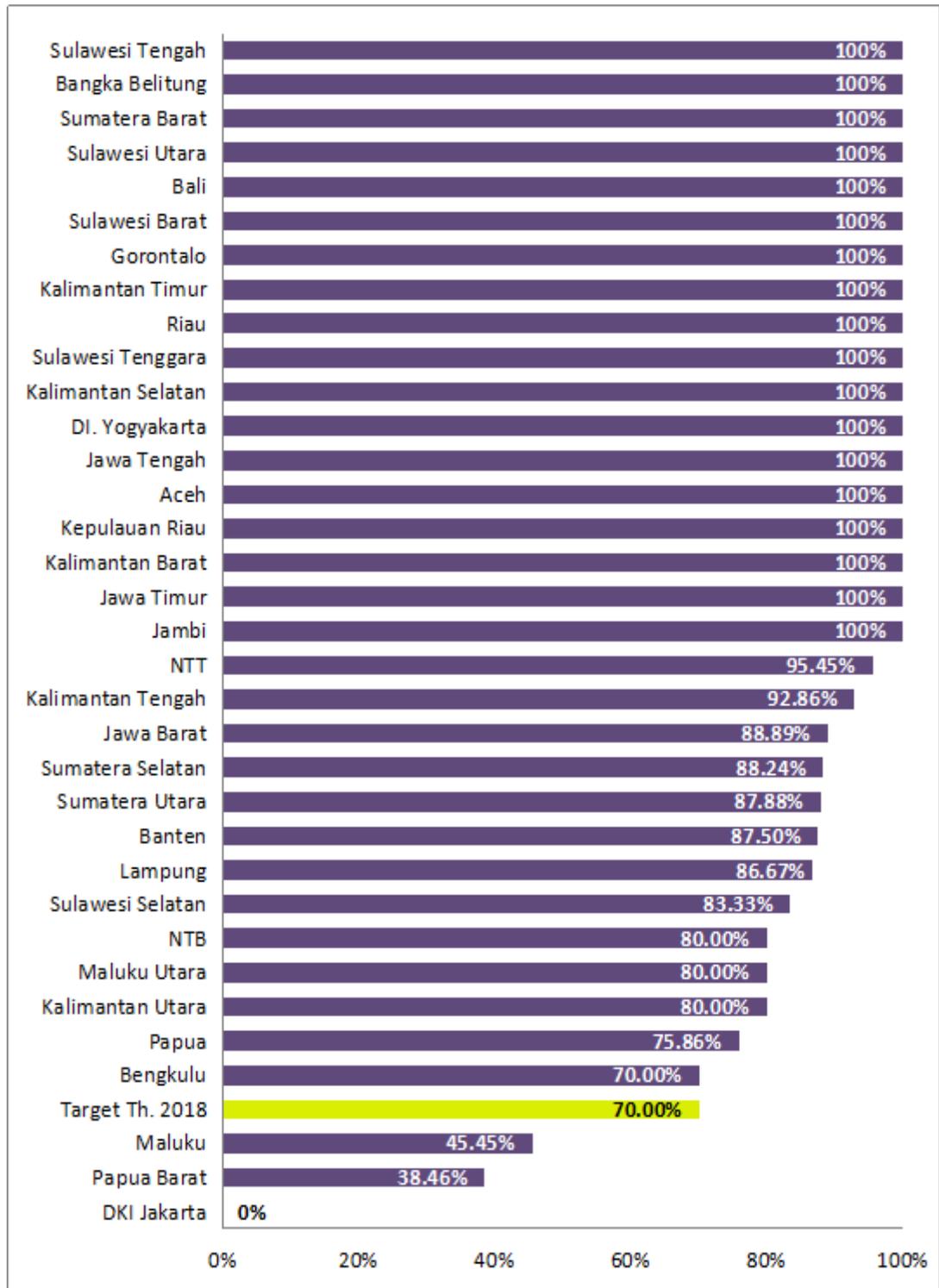
Meningkatnya jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar setiap tahun merupakan tren positif yang menunjukkan konsistensi atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan. Manajemen pengelolaan obat merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan obat yang cukup, aman dan berkualitas yang berdampak pada status kesehatan masyarakat.

Tahun 2015 terdapat 4 Provinsi yang seluruh Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota-nya (IFK) telah melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar (100%). Sementara di tahun 2016, 2017 dan 2018 jumlahnya kian meningkat menjadi 5 Provinsi, 12 Provinsi, dan 18 Provinsi.

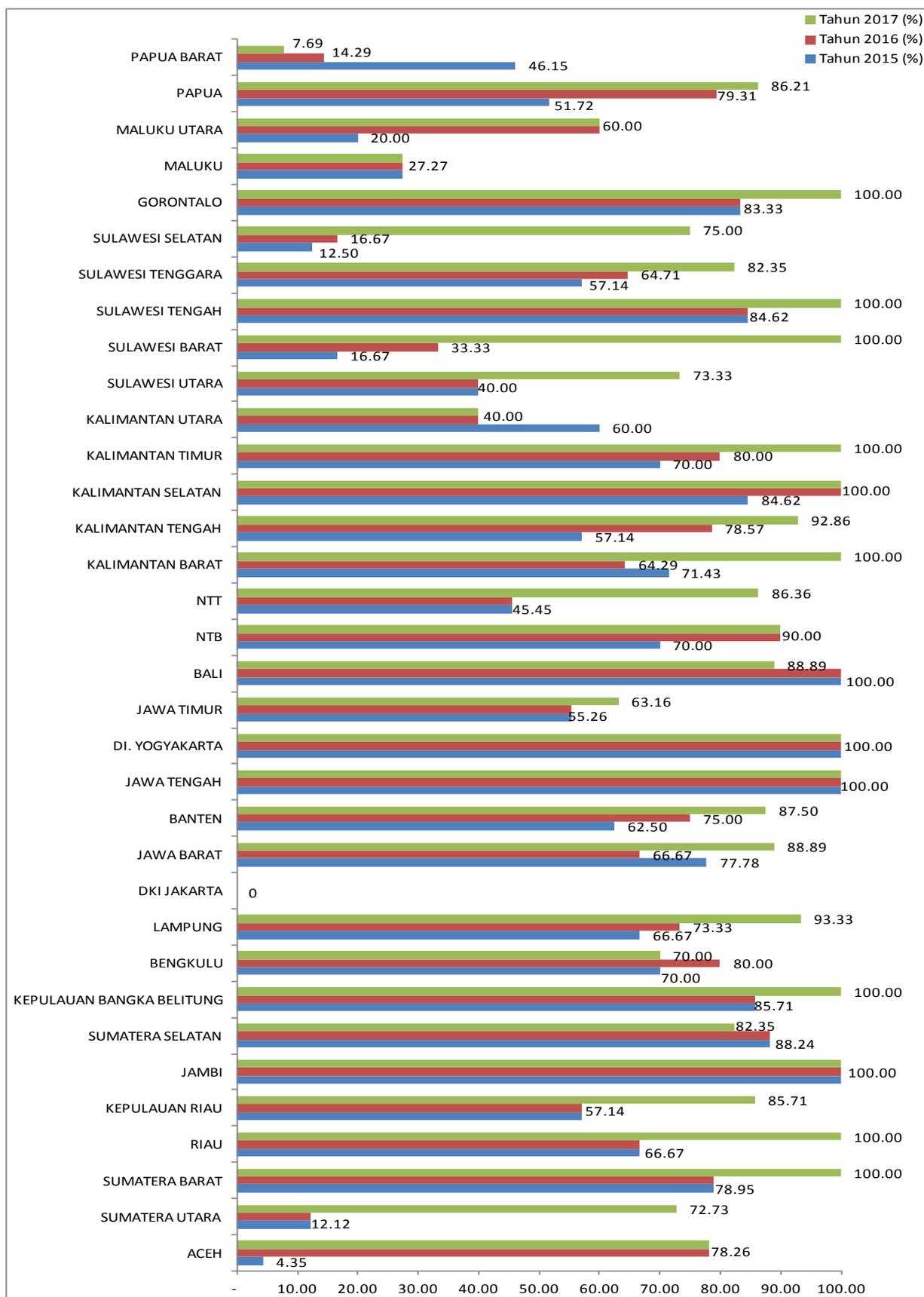
Skor rata-rata tertinggi di tahun 2015 dimiliki oleh Provinsi DI. Yogyakarta (87,07), sedangkan di tahun 2016 dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat (87,29). Tahun 2017 dan 2018 skor rata-rata tertinggi kembali dimiliki oleh Provinsi DI. Yogyakarta (90,03 dan 94,01).

Skor rata-rata terendah baik di tahun 2015 (53.67) maupun tahun 2016 dan 2018 (59.73) dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Rendahnya nilai tersebut dikarenakan Provinsi DKI Jakarta memiliki bentuk pemerintahan daerah khusus sehingga berdampak kepada organisasi institusi kesehatan, dimana sebagian besar pengelolaan obatnya dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan. Tahun 2017 skor rata-rata terendah dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara (31,68). Hal ini dikarenakan ada tiga Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang tidak mengirimkan laporan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Dari 34 Provinsi yang telah mengumpulkan data capaian skor IFK yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di tahun 2015, masih terdapat 12 Provinsi yang mempunyai skor rata-rata di bawah 70, sedangkan di tahun 2016 dan 2017 jumlah tersebut berkurang menjadi hanya 7 dan 6 Provinsi. Tahun 2018 jumlah Provinsi yang memiliki skor rata-rata di bawah 70 kembali berkurang menjadi hanya 2 Provinsi yaitu Papua Barat dan DKI Jakarta.



Gambar 19. Grafik Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018



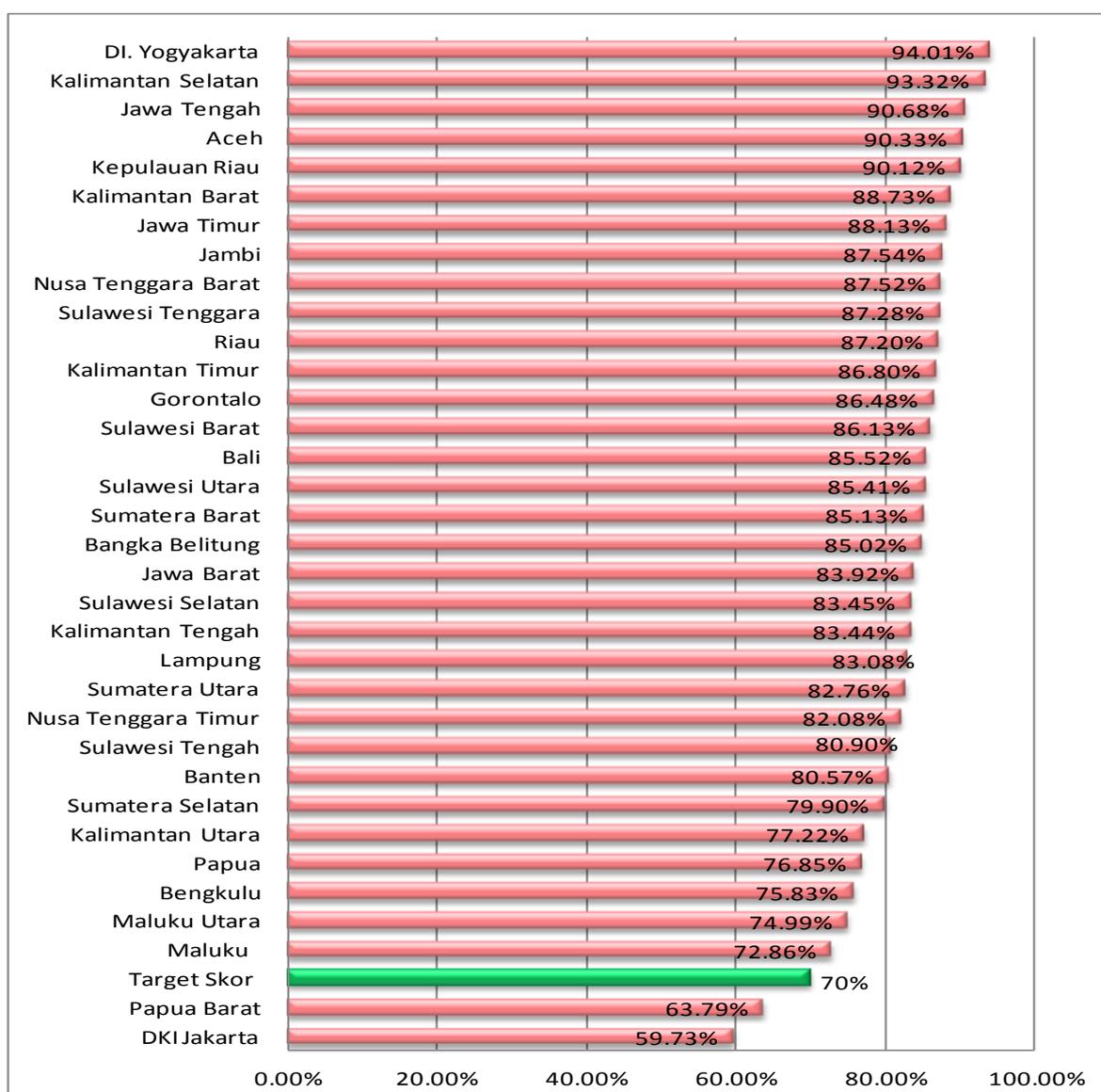
Gambar 20. Grafik Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2017

## b. Permasalahan.

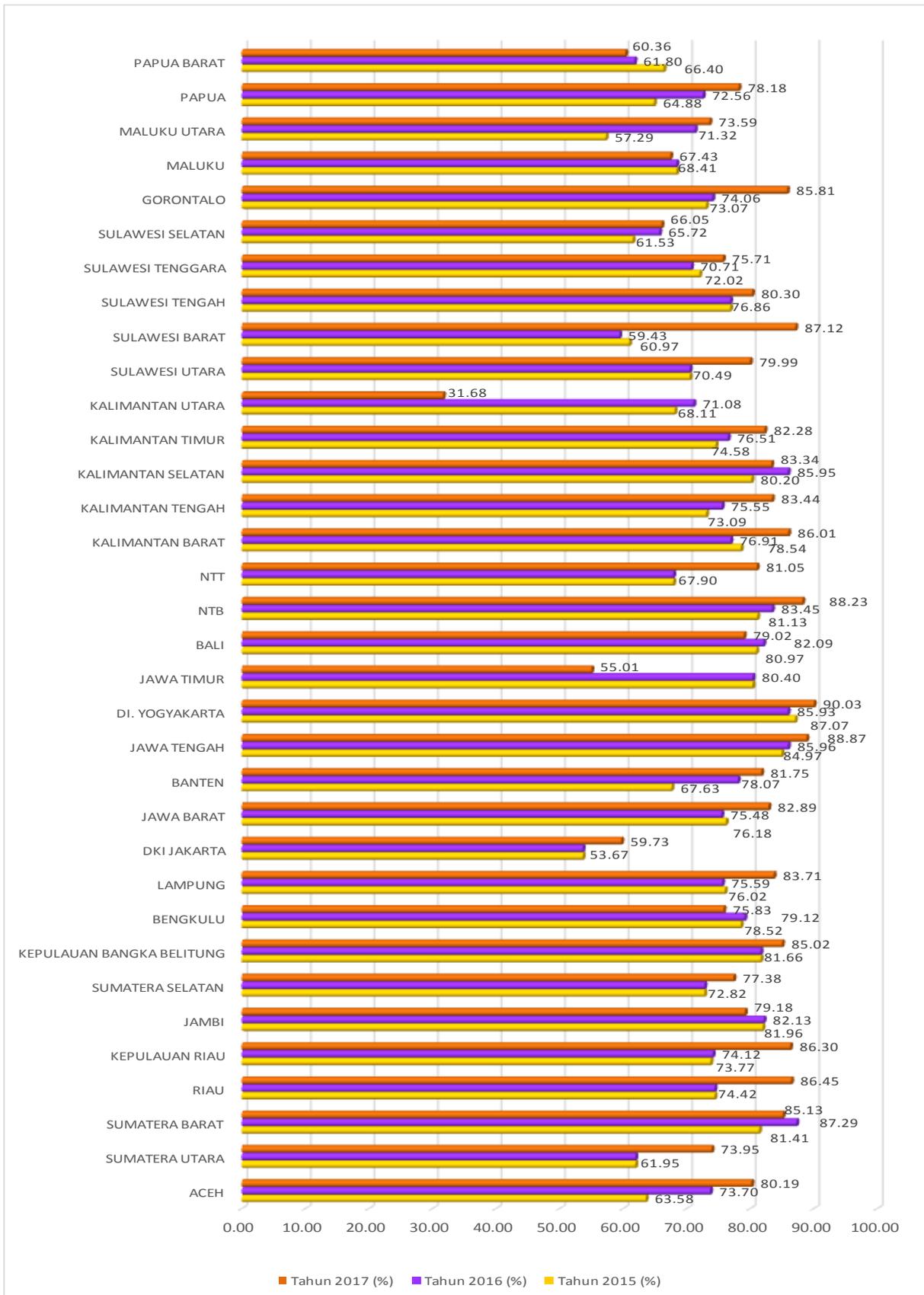
Permasalahan dalam pencapaian indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar sepanjang tahun 2018 adalah mekanisme pelaporan data yang masih manual dan sistem penilaian yang bersifat *self assessment*.

## c. Upaya Pemecahan Masalah.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain dengan memanfaatkan sistem pelaporan data yang terintegrasi dengan mekanisme pelaporan data daerah sebagai mekanisme pelaporan dan verifikasi hasil penilaian.



Gambar 21. Grafik Skor Rata-Rata IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018



Gambar 22. Grafik Skor Rata-Rata IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2015-2017

**d. Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator.**

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase IFK yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Pusat;
- 3) Melakukan Koordinasi Teknis Pengendalian Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 4) Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi *One Gate Policy* Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah;
- 5) Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan Terkait Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.



Gambar 23. Dokumentasi Hasil Bimbingan Teknis Implementasi *One Gate Policy* Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Dalam mencapai sasaran strategis kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selain melaksanakan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator kinerja kegiatan juga menjalankan kegiatan dukungan manajemen administrasi perkantoran sebagai berikut:

- 1) Melakukan Koordinasi Kerja Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- 3) Meningkatkan Kapasitas SDM tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- 4) Mendukung Manajemen Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- 5) Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
- 6) Layanan Perkantoran.



Gambar 24. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pasca Bencana Gempa di Provinsi NTB Tahun 2018

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan semula didukung oleh anggaran DIPA tahun 2018 sebesar Rp. 4.650.555.120.000,-. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terjadi revisi DIPA akibat tambahan anggaran berupa hibah luar negeri (HLN) dari *Global Alliance for Vaccine Immunization* (GAVI) sebesar Rp.146.617.155.000,- dan *World Health Organization* (WHO) sebesar Rp. 152.800.000,- sehingga nilai anggaran DIPA tahun 2018 bertambah menjadi Rp. 4.797.325.075.000,-.

Dana hibah GAVI dipergunakan untuk penyediaan Vaksin JE (*Japanese Encephalitis*), Vaksin IPV (*Inactivated Polio Vaccine*), Vaksin MR (*Measles & Rubela*), ADS (*Auto Disable Syringe*) dan *Safety Box*. Sementara dana hibah WHO dipergunakan untuk kegiatan Penentuan Instalasi Farmasi Pemerintah sebagai Pusat Pembelajaran Tata Kelola Obat Tersertifikasi ISO 9001:2015.

Nilai anggaran yang terealisasi di tahun 2018 sebesar Rp. 3.939.003.833.931,- dengan persentase sebesar 82,11%. Persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 17,52% dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya Daerah yang sudah melaksanakan penyediaan beberapa jenis obat program menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga alokasi di DIPA Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tidak dapat terserap maksimal. Selain itu terdapat kendala dalam proses penyediaan beberapa jenis obat program terkait spesifikasi teknis dan harga sehingga terjadi gagal lelang, namun bukan berarti item obat program tersebut tidak tersedia. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga ketersediaan item obat program yang mengalami kendala dalam proses penyediaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

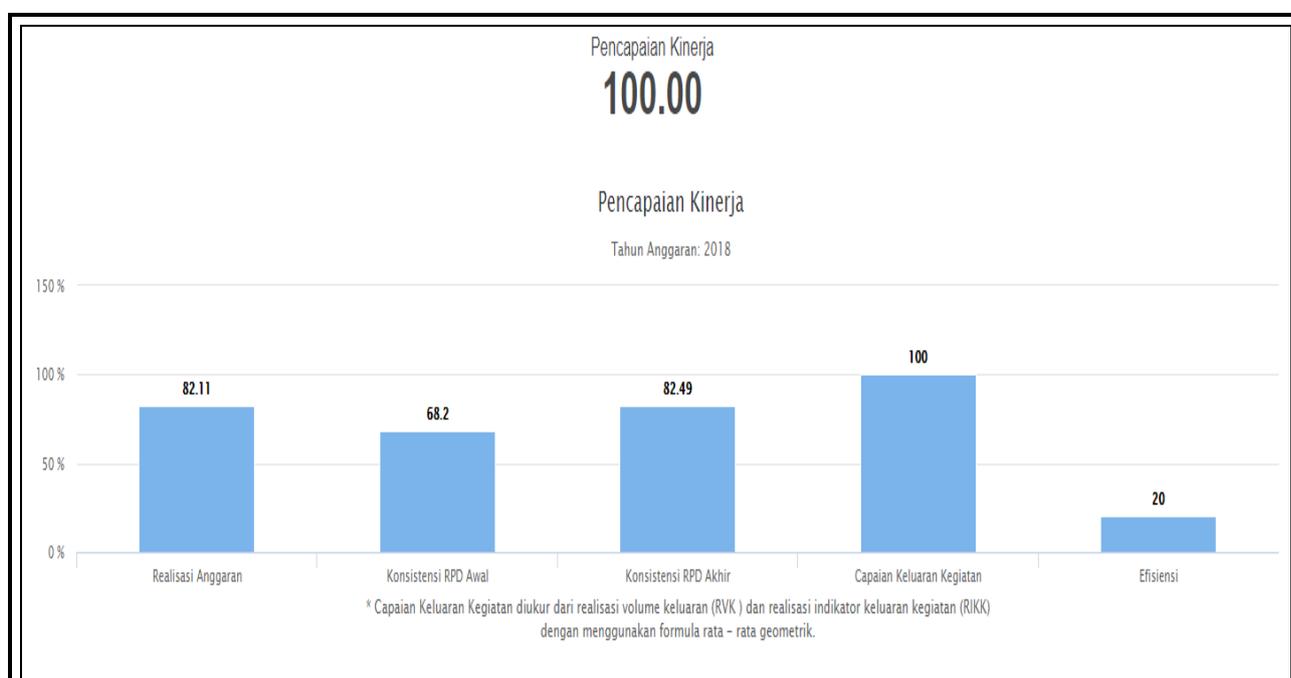
Tahun	Alokasi	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 1.631.612.131.000,-	Rp. 1.599.658.624.605,-	98,04%
2016	Rp. 2.955.647.197.000,-	Rp. 2.482.995.585.076	84,01%
	Rp. 2.517.036.899.000,- *)		98,65% *)
2017	Rp. 3.150.602.864.000,-	Rp. 3.139.052.391.603,-	99,63%
2018	Rp. 4.797.325.075.000,-	Rp. 3.939.003.833.931,-	82,11%

\*) Nilai sesudah terbitnya Inpres Nomor 8 tahun 2016 (*self blocking*)

Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2018

Monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART / e-Monev DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Aplikasi SMART merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. Dengan aplikasi ini, diharapkan proses pelaporan hasil monitoring dan evaluasi anggaran menjadi lebih sederhana, terupdate secara online sehingga perolehan data lebih akurat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari aplikasi SMART, pencapaian kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan masuk dalam kategori Sangat Baik karena melebihi nilai 90%, yaitu sebesar 100%. Meskipun penyerapan anggaran hanya sebesar 82,11% namun mampu menghasilkan capaian keluaran kegiatan sebesar 100% sehingga nilai efisiensinya mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah berhasil melakukan penghematan anggaran. Nilai efisiensi tersebut diperoleh dari hasil konversi terhadap angka efisiensi menggunakan rumus :  $50\% + ((\text{angka efisiensi} / 20) \times 50)$ . Angka efisiensi Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mencapai batas maksimal yaitu 20.



Gambar 25. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan melalui Aplikasi SMART Tahun 2018

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai IKPA Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan juga masuk dalam kategori sangat baik, yaitu sebesar 95,02% melebihi nilai IKPA Nasional yaitu 92,73%.

INDIKATOR KINERJA	NILAI BOBOT (%)	NILAI AKHIR
1. Pengelolaan UP	10	8,8
2. Penyampaian Kontrak	10	9,7
3. Kesalahan SPM	5	4,85
4. Retur SP2D	5	5
5. Realisasi Anggaran	20	18,12
6. Halaman III DIPA	5	4,08
7. Rekonsiliasi LPJ	0	0
8. Perencanaan Kas	5	4,9
9. Revisi DIPA	5	5
10. Penyelesaian Tagihan	20	19,82
11. Pagu Minus	5	5
12. Dispensasi SPM	5	5
Nilai Total :	95	90,27
NILAI AKHIR (Total Nilai Akhir / Total Nilai Bobot) :		95,02

Tabel 15. Hasil Penilaian IKPA Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah disusun di awal tahun, dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai pelaksana kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan pada program kefarmasian dan alat kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Hal ini tampak pada realisasi indikator kinerja kegiatan di tahun 2018 yang telah melebihi target yang telah ditetapkan baik di Renstra awal maupun Renstra revisi pertama.

Indikator Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas terealisasi sebesar 92,47% dari target 86% (persentase capaian 107,52%). Indikator Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial terealisasi sebesar 92,83% dari target 90% (persentase capaian 103,14%). Indikator Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) terealisasi sebesar 34,49% dari target 30% (persentase capaian 114,97%). Sementara untuk indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar terealisasi sebesar 89,69% dari target 70% (persentase capaian 128,13%).

Dari segi anggaran, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyerap anggaran sebesar 82,11% yaitu Rp. 3.939.003.833.931,- dari alokasi Rp. 4.797.325.075.000,-. Hasil monitoring dan Evaluasi dari Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SMART maupun IKPA menunjukkan bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan memiliki kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, yaitu 92,48% (Aplikasi SMART) dan 95,02% (IKPA). Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran pada periode berikutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masa mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan di tahun 2019 masih tetap difokuskan kepada upaya untuk :

1. Menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
2. Standardisasi harga obat;
3. Penguatan dalam manajemen tata kelola obat dan perbekalan kesehatan;
4. Penguatan implementasi aplikasi e-monev katalog obat dan aplikasi logistik obat dan BMHP; serta
5. Pemantauan pasar obat dan perbekalan kesehatan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan pada Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 ini. Untuk itu masukan maupun saran perbaikan sangat kami harapkan demi terwujudnya Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, perbaikan dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang lebih optimal untuk periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

\* \* \*

**Lampiran 1**  
**Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan**  
**Perbekalan Kesehatan Tahun 2018**



**DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**  
**DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN**  
**PERBEKALAN KESEHATAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt

Jabatan : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2017



Pihak Kedua,

Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D  
NIP.195805031983032001



Pihak Pertama

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt  
NIP.196101191988032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**  
**DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN**  
**KESEHATAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	90
	Instalasi farmasi provinsi dan Kabupaten/Kota menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	2. Persentase instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	30
	Instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	3. Persentase Instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	70

**Kegiatan**

1. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

**Anggaran**

Rp 4.650.555.120.000,-

Jakarta, 15 Desember 2017



Pihak Kedua,  
 Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D  
 NIP. 195805031983032001



Pihak Pertama,  
 Dra. Eniko Sosialine Magdalene, Apt  
 NIP. 196101191988032001

**Lampiran 2**  
**Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Unit Eselon II : Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tahun Anggaran : 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	90
	Instalasi farmasi provinsi dan Kabupaten/Kota menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	2. Persentase instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	30
	Instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	3. Persentase Instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	70

Jakarta, 15 Desember 2017  
 Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan



Dra. Endang Sosialine Magdalene, Apt  
 NIP. 196101191988032001

### Lampiran 3

## Capaian Indikator Kinerja Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Tahun 2018

NO.	NAMA OBAT	SATUAN	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESSENSIAL	PROVINSI															
				ACAH	SURABAYA	YOGYAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	DIYOGOMARTAS	BANJAWANG	CELEBES	SUMATERA SELATAN	SUMATERA UTARA	RIAU	ACEH	DIYOGOMARTAS	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	BANJAWANG
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Alkandaid tab	Tablet	89.16%	338	492	263	206	176	58	175	273	54	79	258	909	690	120	742	159
2	Amoxicilin 500 mg tab	Tablet	98.39%	341	564	263	213	179	80	175	289	63	86	333	583	872	121	769	202
3	Amoxicilin injekt	Botol	92.54%	299	500	263	193	181	78	165	266	36	85	325	562	849	121	747	196
4	Deksametason tab	Tablet	96.89%	325	537	263	219	182	80	166	293	52	82	359	579	868	121	783	197
5	Diazepam injeksi 5 mg/ml	Ampul	65.03%	189	156	263	142	164	57	86	140	26	50	132	777	517	119	635	155
6	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)	Ampul	90.56%	302	477	263	184	167	80	167	272	63	82	322	537	801	119	767	151
7	Foliumvitamin (Vitamin K) injeksi	Ampul	90.89%	308	547	263	197	182	90	175	263	64	84	332	800	734	121	766	181
8	Furazemid tablet 40 mg/5hidrokloriazid (HCT)	Tablet	94.73%	324	567	263	202	171	80	176	266	59	86	331	565	847	121	786	187
9	Gliserin orali	Kantong	93.11%	331	467	263	182	175	80	162	285	58	85	333	510	793	120	770	199
10	Glibenklamid/Metformin	Tablet	94.77%	337	513	263	209	188	80	170	281	61	86	329	557	823	121	782	196
11	Kaptopril tab	Tablet	96.02%	340	545	263	172	178	79	171	294	63	87	332	574	843	121	792	196
12	Magnesium Sulfat injeksi 20%	Vial	81.83%	174	479	263	194	166	57	120	184	48	66	321	809	693	118	706	183
13	Methylogonistrol Maltat inj. 0,290 mg-1 ml	Ampul	89.79%	311	518	263	190	177	58	157	272	58	83	327	511	734	111	744	164
14	Obat Anti Tuberculosis dewasa	Paket	91.95%	343	562	263	212	169	80	176	285	39	84	321	579	800	121	792	186
15	Oksitocin injeksi	Ampul	93.67%	336	550	263	209	182	80	174	263	60	86	327	548	725	112	748	172
16	Parasetamol 500 mg tab	Tablet	97.56%	334	548	263	214	178	80	161	271	64	85	333	582	869	121	793	200
17	Tablet Tambah Darah	Tablet	97.66%	347	535	263	207	171	80	177	291	61	87	333	584	844	121	792	197
18	Vaksin BCG	Vial	98.29%	348	566	263	214	182	80	179	286	62	84	333	588	851	121	795	197
19	Vaksin DPT/ DPT HB/ DPT HB-HB	Vial	97.13%	348	560	263	209	182	76	179	270	63	83	333	578	856	121	782	195
20	Vaksin TB	Vial	97.36%	348	558	263	213	182	76	179	280	63	85	333	575	849	119	793	190
a	Jumlah item obat indikator yang tersedia di Puskesmas		170,641	6,423	10,241	5,260	3,982	3,512	1,469	3,280	5,324	1,117	1,640	6,341	18,807	15,908	2,390	15,283	3,685
b	Jumlah Puskesmas yang Memiliki 60% Obat dan Vaksin Esensial		895	325	552	263	208	179	58	164	268	64	83	332	562	782	121	779	180
c	Jumlah Puskesmas yang melapor		922	349	571	263	214	182	80	179	295	64	87	333	594	873	121	797	207
d	Jumlah Puskesmas		984	350	571	264	214	183	82	179	295	64	87	330	590	875	121	800	217
Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial			92.89%	93.1%	96.7%	100.0%	97.2%	98.4%	72.5%	91.6%	90.8%	100.0%	95.4%	99.7%	96.8%	89.6%	100.0%	97.7%	87.0%
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas			92.47%	92.0%	89.7%	100.0%	93.0%	96.5%	91.8%	91.9%	90.2%	87.3%	94.3%	95.2%	94.0%	91.1%	98.8%	95.9%	89.0%
Persentase Puskesmas yang Melapor			93.35%	99.7%	100.0%	99.6%	100.0%	99.5%	24.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.1%	94.7%	99.8%	100.0%	83.0%	87.3%



NO.	NAMA OBAT	SATUAN	PROVINSI																	
			BALI	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN UTARA	SULAWESI UTARA	SULAWESI TENGAH	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGGARA	GORONTALO	SULAWESI BARAT	MALUKU	MALUKU UTARA	PAPUA BARAT	PAPUA
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Albendazol tab	Tablet	119	145	319	173	131	204	172	46	164	137	435	214	70	93	199	125	117	372
2	Amoxicillin 500 mg tab	Tablet	120	155	376	228	137	225	181	47	185	169	448	267	78	94	199	117	130	389
3	Amoxicillin syrup	Botol	109	148	247	203	132	222	168	37	188	164	438	234	76	94	199	109	130	377
4	Deksametason tab	Tablet	120	155	344	226	135	233	167	45	187	169	447	265	76	90	199	117	126	369
5	Diazepam injeksi 5 mg/ml	Ampul	113	156	227	126	91	203	117	18	123	110	406	148	46	93	138	53	45	174
6	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCl)	Ampul	119	149	298	199	138	223	174	46	159	136	442	263	74	94	171	103	100	314
7	Florenadon (Vitamin K) injeksi	Ampul	101	155	332	195	132	210	161	44	162	168	444	213	58	94	180	99	110	361
8	Furosemid tablet 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT)	Tablet	117	156	325	185	146	231	182	48	155	150	445	226	75	88	184	120	111	366
9	Garam oralit	Kantong	118	149	329	228	136	218	178	47	181	154	395	272	78	93	196	120	119	364
10	Glibenklamid/Metformin	Tablet	109	156	287	194	117	227	180	43	185	174	445	268	77	94	198	124	127	363
11	Kaptopril tab	Tablet	116	152	333	215	146	229	170	43	188	161	446	252	56	94	199	124	129	357
12	Magnesium Sulfat injeksi 20%	Vial	114	148	234	195	128	200	165	42	126	142	438	224	61	87	179	79	62	243
13	Metilergometrin Mekat inj 0,200 mg-2 ml	Ampul	113	149	308	197	140	207	163	32	170	138	444	258	66	89	199	110	104	320
14	Obat Anti Tuberculosis dewasa	Paket	119	155	317	224	130	230	183	47	181	172	448	252	78	93	199	100	97	232
15	Oksitosin injeksi	Ampul	119	154	369	228	140	221	142	47	151	166	441	268	75	94	180	96	112	355
16	Parasetamol 500 mg tab	Tablet	114	155	316	234	147	233	179	47	183	168	448	275	78	94	199	125	125	386
17	Tablet Tambah Darah	Tablet	119	155	373	229	133	232	184	46	173	159	446	271	78	94	199	126	124	380
18	Vaksin BCG	Vial	119	157	351	229	151	234	182	47	187	172	448	265	78	94	199	125	118	364
19	Vaksin DPT/ DPT-Hb/ DPT-Hb-Hib	Vial	119	156	311	231	149	232	182	47	182	170	442	260	78	94	199	127	118	367
20	Vaksin Td	Vial	118	158	328	231	138	230	184	46	186	168	448	262	78	94	199	127	117	365
a	Jumlah item obat indikator yang tersedia di Puskesmas		2,315	3,063	6,324	4,170	2,697	4,444	3,415	860	3,416	3,147	8,794	4,957	1,434	1,854	3,814	2,226	2,221	6,818
b	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki 80% Obat dan Vaksin Esensial		117	156	254	202	129	224	182	46	166	160	447	252	72	94	196	105	109	334
c	Jumlah Puskesmas yang melapor		120	158	378	237	151	234	184	48	188	175	448	276	78	94	199	128	131	391
d	Jumlah Puskesmas		120	158	401	242	195	234	185	49	188	199	448	281	93	94	199	128	155	393
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial		97.5%	98.7%	67.2%	85.2%	85.4%	95.7%	98.9%	95.8%	88.3%	91.4%	99.8%	91.3%	92.3%	100.0%	98.5%	82.0%	83.2%	85.4%
	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas		96.5%	96.9%	83.7%	88.0%	89.3%	95.0%	92.8%	89.6%	90.9%	89.9%	98.1%	89.8%	91.9%	98.6%	95.8%	87.0%	84.8%	87.2%
	Persentase Puskesmas yang Melapor		100.0%	100.0%	94.3%	97.9%	77.4%	100.0%	99.5%	98.0%	100.0%	87.9%	100.0%	98.2%	83.9%	100.0%	100.0%	100.0%	84.5%	99.5%

**Lampiran 4**  
**Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018**

NO	PROVINSI	JUMLAH TOTAL KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IFK SESUAI STANDAR (SKOR ≥ 70)	JUMLAH IFK TIDAK SESUAI STANDAR (SKOR < 70)	PERSENTASE IFK SESUAI STANDAR (%)	SKOR RATA-RATA
1	DI. YOGYAKARTA	5	5	0	100	94.01
2	KALIMANTAN SELATAN	13	13	0	100	93.32
3	JAWA TENGAH	35	35	0	100	90.68
4	ACEH	23	23	0	100	90.33
5	KEPULAUAN RIAU	7	7	0	100	90.12
6	KALIMANTAN BARAT	14	14	0	100	88.73
7	JAWA TIMUR	38	38	0	100	88.13
8	IAMB	11	11	0	100	87.94
9	NUSA TENGGARA BARAT	10	8	2	80	87.52
10	SULAWESI TENGGARA	17	17	0	100	87.28
11	RIAU	12	12	0	100	87.20
12	KALIMANTAN TIMUR	10	10	0	100	86.80
13	GORONTALO	6	6	0	100	86.48
14	SULAWESI BARAT	6	6	0	100	86.13
15	BALI	9	9	0	100	85.52
16	SULAWESI UTARA	15	15	0	100	85.41
17	SUMATERA BARAT	19	19	0	100	85.13
18	BANGKA BELITUNG	7	7	0	100	85.02
19	JAWA BARAT	27	24	3	89	83.92
20	SULAWESI SELATAN	24	20	4	83	83.45
21	KALIMANTAN TENGAH	14	13	1	93	83.44
22	LAMPUNG	15	13	2	87	83.08
23	SUMATERA UTARA	33	29	4	88	82.76
24	NUSA TENGGARA TIMUR	22	21	1	95	82.08
25	SULAWESI TENGAH	13	13	0	100	80.90
26	BANTEN	8	7	1	88	80.57
27	SUMATERA SELATAN	17	15	2	88	79.90
28	KALIMANTAN UTARA	5	4	1	80	77.22
29	PAPUA	29	22	7	76	76.85
30	BENGKULU	10	7	3	70	75.83
31	MALUKU UTARA	10	8	2	80	74.99
32	MALUKU	11	5	6	45	72.86
33	PAPUA BARAT	13	5	8	38	63.75
34	DKI JAKARTA	6	0	6	0	59.73
	<b>JUMLAH</b>	<b>514</b>	<b>461</b>	<b>53</b>	<b>89.69</b>	<b>83.14</b>

Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar TW IV : 89.69%

Jakarta, 09 Desember 2018  
 Direktur Tata Kelola Obat Publik dan  
 Perbekalan Kesehatan,  
  
 Dr. Sadiyah, Apt, M.Kes  
 NIP. 196011141921032001

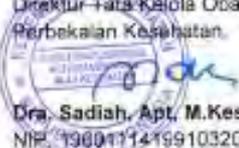
**Lampiran 5**  
**Capaian Indikator Kinerja Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan**  
**Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP Tahun**  
**2018**

No	NAMA	PROVINSI/KAB/KOTA	KET
1	INSTALASI FARMASI PROVINSI	ACEH	
2	INSTALASI FARMASI	SIMEULUE	
3	INSTALASI FARMASI	ACEH SINGKIL	
4	INSTALASI FARMASI	ACEH SELATAN	
5	INSTALASI FARMASI	ACEH TENGGARA	
6	INSTALASI FARMASI	ACEH TIMUR	
7	INSTALASI FARMASI	ACEH TENGAH	
8	INSTALASI FARMASI	ACEH BARAT	
9	INSTALASI FARMASI	BIREUEN	
10	INSTALASI FARMASI	ACEH UTARA	
11	INSTALASI FARMASI	GAYO LUES	
12	INSTALASI FARMASI	ACEH TAMIANG	
13	INSTALASI FARMASI	NAGAN RAYA	
14	INSTALASI FARMASI	BENER MERIAH	
15	INSTALASI FARMASI	PIDIE JAYA	
16	INSTALASI FARMASI	KOTA BANDA ACEH	
17	INSTALASI FARMASI	KOTA SABANG	
18	INSTALASI FARMASI	KOTA LHOEKSEUMAWE	
19	INSTALASI FARMASI PROVINSI	SUMATERA UTARA	
20	INSTALASI FARMASI	NIAS	
21	INSTALASI FARMASI	TAPANULI TENGAH	
22	INSTALASI FARMASI	TAPANULI UTARA	
23	INSTALASI FARMASI	ASAHAN	
24	INSTALASI FARMASI	SIMALUNGUN	
25	INSTALASI FARMASI	DAIRI	
26	INSTALASI FARMASI	HUMBANG HASUNDUTAN	
27	INSTALASI FARMASI	PADANG LAWAS	
28	INSTALASI FARMASI	KOTA TEBING TINGGI	
29	INSTALASI FARMASI	KOTA GUNUNG SITOLI	
30	INSTALASI FARMASI	TANAH DATAR	
31	INSTALASI FARMASI	PADANG PARIAMAN	
32	INSTALASI FARMASI	LIMA PULUH KOTA	
33	INSTALASI FARMASI	DHARMASRAYA	
34	INSTALASI FARMASI	PASAMAN BARAT	
35	INSTALASI FARMASI	KOTA PADANG	
36	INSTALASI FARMASI	KOTA SOLOK	
37	INSTALASI FARMASI	KOTA BUKITTINGGI	
38	INSTALASI FARMASI	KOTA PAYAKUMBUH	
39	INSTALASI FARMASI	INDRAGIRI HILIR	
40	INSTALASI FARMASI	KOTA DUMAI	
41	INSTALASI FARMASI	TANJUNG JABUNG BARAT	
42	INSTALASI FARMASI	BUNGO	
43	INSTALASI FARMASI	BENGKULU SELATAN	
44	INSTALASI FARMASI	KOTA BENGKULU	
45	INSTALASI FARMASI PROVINSI	LAMPUNG	
46	INSTALASI FARMASI	LAMPUNG SELATAN	
47	INSTALASI FARMASI	LAMPUNG UTARA	
48	INSTALASI FARMASI	PRINGSEWU	

No	NAMA	PROVINSI/KAB/KOTA	KET
49	INSTALASI FARMASI	PESISIR BARAT	
50	INSTALASI FARMASI	KOTA BANDAR LAMPUNG	
51	INSTALASI FARMASI	BANGKA	
52	INSTALASI FARMASI	KOTA PANGKAL PINANG	
53	INSTALASI FARMASI	KARIMUN	
54	INSTALASI FARMASI	BINTAN	
55	INSTALASI FARMASI	BANDUNG	
56	INSTALASI FARMASI	BANDUNG BARAT	
57	INSTALASI FARMASI	KOTA SUKABUMI	
58	INSTALASI FARMASI	BANJARNEGARA	
59	INSTALASI FARMASI	WONOSOBO	
60	INSTALASI FARMASI	KUDUS	
61	INSTALASI FARMASI	KENDAL	
62	INSTALASI FARMASI	PEKALONGAN	
63	INSTALASI FARMASI	PEMALANG	
64	INSTALASI FARMASI	KOTA PEKALONGAN	
65	INSTALASI FARMASI	KOTA YOGYAKARTA	
66	INSTALASI FARMASI	TRENGGALEK	
67	INSTALASI FARMASI	BLITAR	
68	INSTALASI FARMASI	LUMAJANG	
69	INSTALASI FARMASI	BANYUWANGI	
70	INSTALASI FARMASI	PASURUAN	
71	INSTALASI FARMASI	MAGETAN	
72	INSTALASI FARMASI	KOTA PASURUAN	
73	INSTALASI FARMASI	KOTA MOJOKERTO	
74	INSTALASI FARMASI	BANTEN	
75	INSTALASI FARMASI	KOTA TANGERANG	
76	INSTALASI FARMASI	KOTA DENPASAR	
77	INSTALASI FARMASI PROVINSI	NUSA TENGGARA BARAT	
78	INSTALASI FARMASI	LOMBOK TENGAH	
79	INSTALASI FARMASI	SUMBAWA	
80	INSTALASI FARMASI	DOMPU	
81	INSTALASI FARMASI	BIMA	
82	INSTALASI FARMASI	SUMBAWA BARAT	
83	INSTALASI FARMASI	KOTA MATARAM	
84	INSTALASI FARMASI	SAMBAS	
85	INSTALASI FARMASI	BENGKAYANG	
86	INSTALASI FARMASI	PONTIANAK	
87	INSTALASI FARMASI	SANGGAU	
88	INSTALASI FARMASI	KOTA SINGKAWANG	
89	INSTALASI FARMASI PROVINSI	KALIMANTAN TENGAH	
90	INSTALASI FARMASI	LAMANDAU	
91	INSTALASI FARMASI	KATINGAN	
92	INSTALASI FARMASI	MURLING RAYA	
93	INSTALASI FARMASI	TAPIN	
94	INSTALASI FARMASI	HULLU SUNGAI SELATAN	
95	INSTALASI FARMASI	HULLU SUNGAI UTARA	
96	INSTALASI FARMASI	TANAH BUMBU	
97	INSTALASI FARMASI PROVINSI	KALIMANTAN TIMUR	
98	INSTALASI FARMASI	PASIR	
99	INSTALASI FARMASI	KUTAI KARTANEGARA	
100	INSTALASI FARMASI	KUTAI TIMUR	

No	NAMA	PROVINSI/KAB/KOTA	KET
101	INSTALASI FARMASI	BERAU	
102	INSTALASI FARMASI	PENAJAM PASER UTARA	
103	INSTALASI FARMASI	KOTA BALIKPAPAN	
104	INSTALASI FARMASI	KOTA SAMARINDA	
105	INSTALASI FARMASI	BULUNGAN	
106	INSTALASI FARMASI	MINAHASA SELATAN	
107	INSTALASI FARMASI PROVINSI	SULAWESI TENGAH	
108	INSTALASI FARMASI	BANGGAI	
109	INSTALASI FARMASI	DONGGALA	
110	INSTALASI FARMASI	SIGI	
111	INSTALASI FARMASI	KOTA PALU	
112	INSTALASI FARMASI	JENEPONTO	
113	INSTALASI FARMASI	PANGKAJENE KEPULAUAN	
114	INSTALASI FARMASI	BONE	
115	INSTALASI FARMASI	SOPPENG	
116	INSTALASI FARMASI	WAJO	
117	INSTALASI FARMASI	LUWU	
118	INSTALASI FARMASI	LUWU TIMUR	
119	INSTALASI FARMASI	TORAJA UTARA	
120	INSTALASI FARMASI	KOTA PALDPO	
121	INSTALASI FARMASI PROVINSI	SULAWESI TENGGARA	
122	INSTALASI FARMASI	BUTON	
123	INSTALASI FARMASI	MUNA	
124	INSTALASI FARMASI	KONawe	
125	INSTALASI FARMASI	KOLAKA	
126	INSTALASI FARMASI	WAKATOBI	
127	INSTALASI FARMASI	KOLAKA UTARA	
128	INSTALASI FARMASI	BUTON UTARA	
129	INSTALASI FARMASI	KONawe KEPULAUAN	
130	INSTALASI FARMASI	KOTA KENDARI	
131	INSTALASI FARMASI	POHUWATO	
132	INSTALASI FARMASI	BONE BOLANGO	
133	INSTALASI FARMASI	MAJENE	
134	INSTALASI FARMASI	MAMUJU	
135	INSTALASI FARMASI	MAMUJU TENGAH	
136	INSTALASI FARMASI	HALMAHERA BARAT	
137	INSTALASI FARMASI	HALMAHERA UTARA	
138	INSTALASI FARMASI	FAK-FAK	
139	INSTALASI FARMASI	KAIMANA	
140	INSTALASI FARMASI PROVINSI	PAPUA	
141	INSTALASI FARMASI	MERAUKE	
142	INSTALASI FARMASI	JAYAWIAYA	
143	INSTALASI FARMASI	NABIRE	
144	INSTALASI FARMASI	YAPEN WARDOPEN	
145	INSTALASI FARMASI	PUNCAK JAYA	
146	INSTALASI FARMASI	MIMIKA	
147	INSTALASI FARMASI	BOVEN DIGOEL	
148	INSTALASI FARMASI	MAPPI	
149	INSTALASI FARMASI	ASMAT	
150	INSTALASI FARMASI	PEGUNUNGAN BINTANG	
151	INSTALASI FARMASI	TOLIKARA	
152	INSTALASI FARMASI	SARMI	

No	NAMA	PROVINSI/KAB/KOTA	KET
153	INSTALASI FARMASI	KEEROM	
154	INSTALASI FARMASI	WAROPEN	
155	INSTALASI FARMASI	SUPIORI	
156	INSTALASI FARMASI	MAMBERAMO TENGAH	
157	INSTALASI FARMASI	DOGIYAI	
158	INSTALASI FARMASI	INTAN JAYA	
159	INSTALASI FARMASI	KOTA MAGELANG	
160	INSTALASI FARMASI	SLEMAN	
161	INSTALASI FARMASI	JEPARA	
162	INSTALASI FARMASI	KLATEN	
163	INSTALASI FARMASI	KOTA SEMARANG	
164	INSTALASI FARMASI	SUKOHARJO	
165	INSTALASI FARMASI PROVINSI	JAWA TENGAH	
166	INSTALASI FARMASI	KEBUMEN	
167	INSTALASI FARMASI	MAGELANG	
168	INSTALASI FARMASI	BLORA	
169	INSTALASI FARMASI PROVINSI	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
170	INSTALASI FARMASI	CILACAP	
171	INSTALASI FARMASI	CIAMIS	
172	INSTALASI FARMASI	PATI	
173	INSTALASI FARMASI	CIREBON	
174	INSTALASI FARMASI	KAPUAS HULU	
175	INSTALASI FARMASI	KOTA DEPOK	
176	INSTALASI FARMASI	MUKOMUKO	
177	INSTALASI FARMASI	KOTA CIREBON	
178	INSTALASI FARMASI	SEMARANG	
179	INSTALASI FARMASI	TEMANGGUNG	
180	INSTALASI FARMASI PROVINSI	KEPULAUAN RIAU	
181	INSTALASI FARMASI	KEPULAUAN MERANTI	
182	INSTALASI FARMASI	DEMAK	
183	INSTALASI FARMASI	BANYUMAS	
184	INSTALASI FARMASI	MALINAU	
185	INSTALASI FARMASI	SUBANG	
186	INSTALASI FARMASI	BOLAANG MONGONDOW UTARA	
187	INSTALASI FARMASI	TASIKMALAYA	
188	INSTALASI FARMASI	SUMEDANG	
189	INSTALASI FARMASI	KOTA BANJAR	
Jumlah IF Provinsi dan IF Kab/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP			189
Jumlah Seluruh IF Provinsi dan IF Kab/Kota di Indonesia			548
Persentase IFP dan IFK yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan BMHP			34.49%

Jakarta, 5 Desember 2018  
 Direktur Tata Kelola Obat Publik dan  
 Perbekalan Kesehatan  
  
 Dra. Sadiyah, Apt, M.Kes  
 NIP. 196011141991032001